Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan



Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0



DRAF LAPORAN AKHIR







TIM PENYUSUN:

- 1. Dr. Suparmono, M.Si.
- 2. Ir. Agus Tri Cahyono, M.T.
- 3. Dr. Rudy Badrudin, M.Si.
- 4. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., MA.

Penelitian ini merupakan penelitian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan PT. Sinergi Visi Utama Consulting. PT. Sinergi Visi Utama Consulting melakukan kontrak Kerjasama dengan STIM YKPN Yogyakarta untuk kebutuhan tenaga ahli dalam penelitian ini

DAFTAR ISI

BAB	I PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Maksud dan Tujuan	I-5
1.3.	Lingkup Kegiatan	I-5
1.4.	Keluaran/Output	I-5
ВАВ	II PENDEKATAN	
2.1.	Teori Ekonomi Daerah	II-1
2.2.	Daya Saing Daerah	II-4
2.3.	Revolusi Industri 4.0	II-13
ВАВ	III METODE PENELITIAN	
3.1.	Kerangka Pikir Studi	III-1
3.2.	Jenis Penelitian	III-2
3.3.	Jenis Data	III-2
3.4.	Metode Pengumpulan Data	III-2
3.5.	Pelaporan	III-3
3.6.	Teknik Analisis Data	III-4
3.7.	Alat Analisis	III-4
3.8.	Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis (SIG)	III-10
3.9.	Metode dan Konsep Pelaksanaan Kegiatan	III-18
3.10.	. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	III-19
ВАВ	IV GAMBARAN UMUM KAWASAN PERENCANAAN	
4.1.	Produk Domestik Bruto Kabupaten Katingan	IV-1
4.1.	Laju Pertumbuhan	IV-2
4.1.	0 ' 1	IV-3
4.1.	Kredit yang Diberikan untuk UMKM	IV-4
	V ANALISIS SEKTOR DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH	
	Analisis Perekonomian dan Sektor Unggulan Daerah	V-1
5.2.	Analisis Produk Unggulan Daerah	V-13
ВАВ	VI ANALISIS FORUM PELEMBAGAAN EKONOMI LOKAL (PEL)	
	Stakeholders yang Terlibat pada Pelembagaan Ekonomi Lokal	VI-1
	Struktur Organisasi Pelembagaan Ekonomi Lokal	VI-5
6.3. I	Rencana Aksi Forum Pelembagaan Ekonomi Lokal	VI-6

BAB VII MASTERPLAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	
7.1. Analisis SWOT	VII-1
7.2. Strategi Pemgembangan Ekonomi Lokal	VII-7
7.3. Masterplan Pemgembangan Ekonomi Lokal	VII-15
DAD VIII DEALITIE	

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- 1. MASTERPLAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
- 2. DRAF SURAT KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENETAPAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

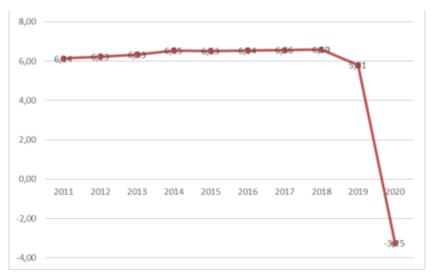
Bab

1

PENDAHULUAN

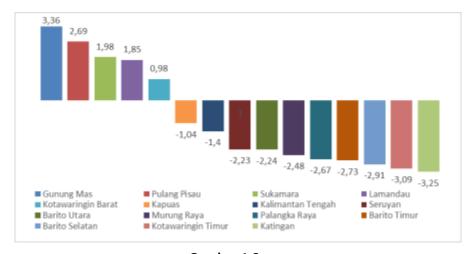
1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat diindikasikan dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan selama periode tahun 2011-2018 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi terdepresiasi cukup signifikan, dari 6,59% pada tahun 2018 menjadi 5,18% pada tahun 2019. Terlebih, kelesuan ekonomi Kabupaten Katingan berlanjut akibat pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar - 3,25% pada tahun 2020.



Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan
Menurut Harga Konstan Tahun 2020

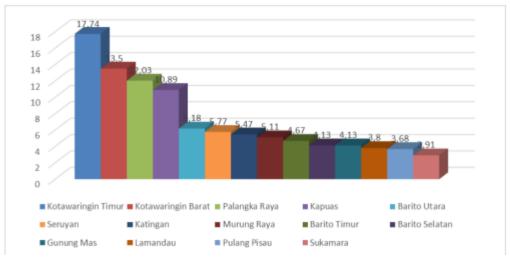
Sumber: BPS Kabupaten Katingan, 2021



Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Harga Konstan Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 dan Kabupaten Katingan memiliki pertumbuhan terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Selain itu, pada Gambar 1.3 terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Katingan terhadap PDRB Kalimantan Tengah berada di posisi ketujuh sehingga belum memiliki peran yang signifikan.



Gambar 1.3

Distribusi PDRB terhadap Jumlah PDRB 14 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan *output* atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Oleh karena itu, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah adalah nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Kabupaten Katingan (2021), sepanjang tahun 2016-2020, sektor yang memberikan kontribusi paling besar kepada PDRB Kabupaten Katingan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,87% dengan nilai tambah terbesar dari usaha perkebunan kelapa sawit. Selain itu, industri pengolahan berkontribusi sebesar 15,43% dengan nilai tambah terbesar dari industri *crude palm oil* (CPO).

Pada masa pandemi COVID-19, perekonomian negara-negara tujuan ekspor kelapa sawit asal Indonesia melambat sehingga berpengaruh juga terhadap menurunnya permintaan komoditas kelapa dalam negeri dan dampaknya dirasakan oleh daerah-daerah produsen komoditas kelapa sawit. Penurunan permintaan komoditas kelapa sawit ini menyebabkan kontraksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan dari 6,14% pada tahun 2016 menjadi -2,19% pada tahun 2020. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar -0,61 persen terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Katingan. Di lain pihak, sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan laju pertumbuhan yaitu dari 9,22% pada tahun 2016 menjadi 0,15% pada tahun 2020. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 0,02 persen terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Katingan.

Dengan adanya pandemi, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Katingan sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi pada pasar nasional maupun global. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga masih sangat bergantung pada korporasi. Oleh karena itu, Kabupaten Katingan membutuhkan alternatif motor penggerak perekonomian lainnya agar tidak bergantung pada korporasi dan hanya mengandalkan sektor tertentu, bahkan dapat mengalami kemajuan signifikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu bersaing dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan peran serta semua stakeholder yang ada dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerah.

Untuk meningkatkan pembangunan daerah, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. Hal ini merupakan proses yang melibatkan pemerintah lokal dan organisasi masyarakat untuk mendorong, merangsang, dan memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely & Bradshaw, 1994). Selain itu, pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan proses yang mencoba merumuskan kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik, serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal (Munir, 2007). Pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM yang ada, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, dan kelembagaan secara lokal. Menurut Blakely (dalam Supriyadi, 2007), keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- 1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;
- 2. Perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
- 3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran;
- 4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Pengembangan ekonomi lokal sejalan dengan arah dari RPJMN tahun 2020-2024 ke-4, yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Pengembangan ekonomi lokal juga mendukung pencapaian misi ke-7 Kabupaten Katingan tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan. Dalam mengupayakan pengembangan ekonomi lokal, pemerintah daerah dan para *stakeholder* perlu untuk memperhatikan perkembangan teknologi yang ada saat ini, dunia sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang menyebabkan banyak perubahan yang berdampak dalam perekonomian dan dunia bisnis, baik berupa dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu beradaptasi sehingga mampu menjawab tantangan yang ada.

Untuk mengakomodir kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk mengembangkan ekonomi lokal Kabupaten Katingan sehingga daya saingnya meningkat pada era revolusi industri 4.0 dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai arah panduan bagi pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan demi mendukung dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kondisi perekonomian daerah yang berdaya saing.

1.3. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dari *master plan* ini meliputi pembentukan forum, rekomendasi pengembangan potensi ekonomi lokal, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan.

1.4. Keluaran/Output

Keluaran dari Kegiatan Penyusunan *Master Plan* Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Katingan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Revolusi Industri 4.0 meliputi:

- 1. Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal;
- 2. Rencana Aksi Forum Pengembangan Ekonomi Lokal;
- 3. Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Katingan;
- 4. *Master Plan* Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Katingan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Revolusi Industri 4.0.

TINJAUAN PUSTAKA

2

2.1. Teori Ekonomi Daerah

2.1.1. Definisi Ekonomi Daerah/Lokal

Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi dalam bahasan ilmu ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi regional memiliki kekhususan dalam menjawab pertanyaan where, yaitu tentang di mana lokasi dari suatu kegiatan yang seharusnya, namun tidak menunjuk pada lokasi konkret. Ilmu ekonomi regional pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan teori ekonomi umum, yaitu full employment, economic growth, dan price stability.

Ilmu ekonomi regional murni membicarakan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah. Terdapat 2 kelompok ilmu yang lazim menggunakan ilmu ekonomi regional sebagai peralatan analisis. *Regional science* adalah gabungan berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis kondisi suatu wilayah dengan menekankan analisisnya pada aspek-aspek sosial ekonomi dan geografi, sedangkan *regional planning* yang lebih menekankan analisisnya pada aspek-aspek tata ruang, *land use* (tata guna lahan), dan perencanaan (*planning*).

Ilmu ekonomi regional dan ekonomi pembangunan mempunyai sasaran yang sama, yaitu mencari langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, akan tetapi, keduanya berbeda terutama karena luas cakupannya. Hampir semua disiplin ilmu berguna dalam perencanaan pembangunan. Ilmu ekonomi regional dapat berperan dalam penentuan kebijakan awal, seperti menyarankan komoditi atau kegiatan apa yang perlu dijadikan unggulan dan di wilayah mana komoditi itu dapat dikembangkan.

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik. Beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah.

Kebijakan ekonomi regional adalah penggunaan secara sadar berbagai macam peralatan (*instrument* atau *means*) untuk merealisasikan tujuan regional yang ingin dicapai. Mungkin dalam jangka panjang apa yang menjadi tujuan itu akhirnya juga akan tercapai tanpa usaha secara sadar, tetapi dilihat dari sudut sosial, politis, atau ekonomis, lebih baik kalau tujuan itu dicapai dalam jangka pendek atau menengah melalui campur tangan pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi regional terdapat banyak teknik analisis untuk menentukan atau memilih aktivitas ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu daerah atau untuk memilih atau menentukan lokasi atau daerah bagi suatu aktivitas ekonomi atau suatu proyek atau membuat perencanaan pengembangan sektor-sektor ekonomi regional. Di antara teknik-teknik analisis tersebut yang tergolong populer dan sederhana adalah Location Quotient (LQ), Capital-Output Ratio/Incremental Capital-Output Ratio, Model Input-Output Leontief, Social Accounting Matrix (Neraca Sosial Ekonomi), Computable General Equilibrium (CGE), Ekonometrika Persamaan Tunggal dan Simultan, Policy Analysis Matrix (PAM), Analisis Biaya Komparatif, Analisis Kompleks Industri, dll.

2.1.2. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan Ekonomi Lokal ini merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely & Bradshaw, 1994). Pengembangan Ekonomi Lokal menurut Munir (2007) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Kemudian definisi Pengembangan Ekonomi Lokal menurut World Bank adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta, dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Mulyana, Fauziyyah, dan Resnawaty, 2017).



Gambar 2.1. Kata Kunci dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Setidaknya terdapat empat kata kunci dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Adapun keempat kata kunci tersebut antara lain: 1) Kegiatan PEL dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak dalam relasi yang setara; 2) Ada aktor-aktor yang terlibat, yang saling terhubung dan mengambil perannya masing-masing. Aktor tersebut terdiri atas pelaku usaha lokal, kelompok usaha, pemerintah desa, maupun pihak swasta; 3) Ada sumber daya atau potensi lokal yang dikelola dalam rangka menjalankan aktivitas ekonomi, baik memproduksi barang maupun jasa; dan 4) Memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pengembangan Ekonomi Lokal ini menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk melihat dinamika ekonomi di tingkat lokal berbasis kewilayahan. Pada dasarnya, PEL mengacu pada strategi pembangunan yang berbasis teritorial (kewilayahan), dimiliki dan dikelola secara lokal, dan terutama ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Rodríguez-Pose, 2002). Pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang berbasis pada komoditi unggulan lokal akan meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal maupun investor.

2.1.3. Prinsip Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan PEL yang inklusif, antara lain:

a. Inklusif

Pelaksanaan PEL memperhatikan kepentingan kelompok marginal dan memberikan kebijakan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar kelompok tersebut berdaya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan menerima manfaat dari pengelolaan sumber daya yang ada di tingkat lokal.

b. **Demokratis**

Pengelolaan harus dilakukan secara demokratis dan mampu mendorong partisipasi semua kalangan mulai dari perencanaan hingga implementasi dan *monitoring* evaluasi program yang dijalankan.

c. Kolektivitas

PEL dikelola oleh para aktor yang memiliki peran beragam dan saling bersinergi, sehingga terbangun kolektivitas (kebersamaan).

d. Akuntabilitas Sosial

Pertanggungjawaban kepada publik terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di tingkat lokal.

e. Keberlanjutan

PEL berorientasi pada upaya mendorong keberlanjutan baik aktivitas produksi maupun ekologi. PEL dikembangkan dari kegiatan ekonomi yang legal dengan

memperhatikan aspek sosio kultural. Hal ini seperti yang terlihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2.
Keberlanjutan PEL

2.1.4. Indikator Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal

Keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari berbagai indikator. Menurut Blakely & Bradshaw (1994) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihatnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;
- 2) Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
- 3) Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan
- 4) Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

2.2. Daya Saing Daerah

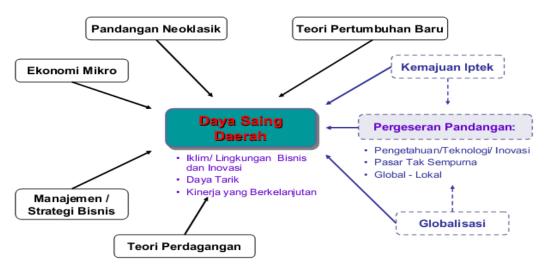
Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi lokal/daerah. Camagni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. Seperti juga ditegaskan antara lain oleh Meyer-Stamer (2003) bahwa "Local Economic Development is about competitiveness—it is about companies thriving in competitive markets and locations thriving in a competitive, globalised world".

Dalam hal ini, daerah adalah area/wilayah geografis tertentu di dalam suatu negara atau antara beberapa negara. Untuk pengertian yang pertama, maka daerah merupakan bagian integral dari suatu negara. Walaupun prakarsa tentang daya saing daerah berkembang pesat di berbagai negara, pengertian (konsep) tentang ini relatif tidak (belum) banyak dibahas (dibanding dengan jumlah prakarsa itu sendiri).

Diskusi tentang daya saing yang secara eksplisit mengelaborasi definisi/pengertian daya saing daerah memang relatif terbatas. Berikut adalah beberapa definisi tentang daya saing daerah:

- 1. Daya saing tempat (lokalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal (setempat) untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga/penduduknya (Malecki, 1999).
- Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal (European Commission, 1999).
- 3. Daya saing daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota konstituen dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menjual tingkat nilai tambah yang lebih tinggi dalam persaingan internasional, dapat dipertahankan oleh aset dan institusi di daerah tersebut, dan karenanya menyumbang pada peningkatan PDB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta *virtuous cycle* dampak pembelajaran (Charles dan Benneworth, 2000).
- 4. Daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan menarik investasi asing (eksternal) dan menentukan peran produktifnya (Camagni, 2002).
- 5. Daya saing perkotaan (urban competitiveness) merupakan kemampuan suatu daerah perkotaan untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya yang serupa dengan produk dari daerah-daerah perkotaan lainnya (World Bank; dan Webster dan Muller, 2000).
- 6. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abdullah, et al., 2002).

Secara sederhana, perkembangan teori/konsep tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan pemahaman tentang daya saing daerah seperti diilustrasikan pada Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3.
Perspektif Teoritis Daya Saing Daerah

Daerah (misalnya kabupaten/kota) merupakan suatu entitas ekonomi dan sebagai bagian integral dari suatu negara (Indonesia). Karena itu, dengan analogi terhadap negara, maka daya saing daerah, hingga batas tertentu, pada dasarnya akan memiliki "keserupaan fitur" dengan daya saing negara. Oleh karena itu, definisi daya saing pada tingkatan "negara" seperti yang telah dibahas dapat diterapkan pada daerah sesuai konteksnya. Dengan merujuk kepada pengertian daya saing nasional dari berbagai lembaga, berikut adalah beberapa "alternatif" definisi umum tentang daya saing daerah:

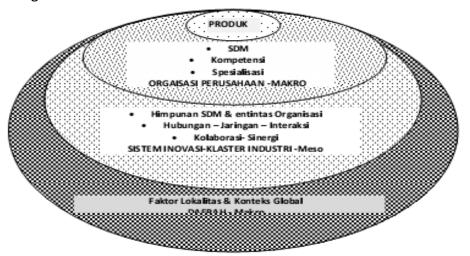
- Kemampuan daerah menarik dan mempertahankan sumber daya produktif dan menentukan peran produktifnya dalam konteks domestik (nasional) dan internasional dengan mengembangkan iklim kondusif dalam memenuhi kebutuhan warga (masyarakatnya) dan perusahaan-perusahaannya, berkaitan dengan kesejahteraan dan efisiensi secara umum secara berkelanjutan.
- 2. Kemampuan suatu daerah menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang dapat mempertahankan daya saing perusahaan-perusahaannya di daerah yang bersangkutan. Kemampuan daerah untuk menghasilkan nilai tambah secara berhasil dalam persaingan nasional dan/atau internasional, dan dalam waktu bersamaan masyarakat di daerah yang bersangkutan juga menikmati suatu standar hidup yang meningkat dan berkelanjutan.
- 3. Tingkatan suatu daerah, dalam kondisi pasar yang bebas dan adil, dapat menghasilkan nilai tambah (barang dan jasa) dalam pasar lokal, nasional dan/atau internasional secara lebih baik (dibanding yang dilakukan pesaingnya), serta dalam saat bersamaan juga mampu memelihara dan memperluas pendapatan riil masyarakatnya untuk periode jangka panjang.

4. Dalam pengertian yang "lebih spesifik", daya saing daerah merupakan pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan yang membawa kepada peningkatan standar hidup, yang didorong oleh kualitas dari strategi dan pengoperasian bisnis, kualitas lingkungan bisnis, dan lingkungan ekonomi makro di daerah yang bersangkutan.

Banyak pihak cenderung untuk menyederhanakan bahwa daya saing suatu daerah merupakan kemampuan daerah menciptakan/mengembangkan dan menawarkan:

- 1. Iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi.
- 2. Daya tarik atau menarik "investasi," talenta (talenta people), dan faktor-faktor mudah bergerak (mobile factors) lainnya, serta potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan.

Jika diilustrasikan, hubungan antara daya saing produk, perusahaan, industri, dan daerah adalah seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.4. Jadi pada dasarnya, produk yang berdaya saing (unggul) hanya akan dihasilkan oleh perusahaan (organisasi) yang berdaya saing (unggul). Perusahaan atau organisasi yang berdaya saing hanya akan berkembang dalam lingkungan industri yang berdaya saing. Industri yang berdaya saing hanya akan berkembang di lokasi/daerah yang juga berdaya saing jika pun dalam kenyataannya ada produk perusahaan/industri yang berdaya saing berkembang di "daerah yang tidak memiliki daya saing" maka sebenarnya hal demikian lebih merupakan "pengecualian" semata dan/atau keunggulannya pun sebenarnya tidak berdaya saing.



Gambar 2.4. Beberapa Prakarsa Analisis Daya Saing Daerah

2.2.1. Indikator Utama Daya Saing Daerah

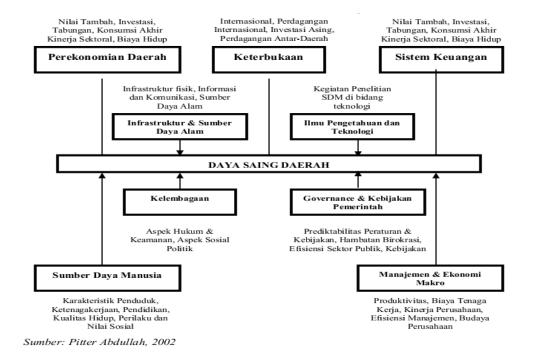
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pitter Abdullah, 2002 dengan judul Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Indikator penentu daya saing daerah adalah Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber daya manusia, Kelembagaan, *Governance* dan Kebijakan Pemerintah, dan Manajemen dan Ekonomi Makro.

Indikator makro daya saing merupakan jaringan antar indikator dan sub-sub indikator yang saling *intercorect*, saling hubungan secara terikat dan terkait (inheren dan koheren) antar dan lintas indikator dan sub indikator, yang pada implementasinya memerlukan pengelolaan yang terintegratif, terencana dan konsisten serta berkesinambungan diantara sembilan indikator penentu daya saing.

Implementasi terintegrasi, mengandung makna bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan perekonomian daerah secara makro sudah barang tertentu melibatkan semua pihak, baik institusi pemerintah daerah, swasta dan lembaga sosial, seta pihak-pihak secara langsung dan tidak langsung secara nyata andil dalam penggerakan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Terencana, asumsi langkah perencanaan adalah untuk memperkecil kegagalan, artinya aktivitas pengembangan daya saing akan gagal total tanpa perencanaan, dan peluang untuk berhasil lebih besar apabila diawali dengan perencanaan yang baik. Konsisten, menunjukkan kepada langkah sentripetal yakni gerak yang mengarah sesuai perencanaan atau gerak taat asas, tidak mengerjakan yang tidak terencana, taat asas merupakan perwujudan dari konsistensi sebuah kesepakatan, tidak merubah kesepakatan tanpa kesepakatan berikutnya, perencanaan adalah kesepakatan.

Adapun berkesinambungan merupakan pekerjaan tiada henti, akan tetapi terus menerus dilakukan pada tahun pertama diikuti tahun kedua dan seterusnya. Indikator dan sub-indikator dari daya saing daerah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5.
Indikator Utama Penentu Daya Saing Daerah
Sumber: Pitter Abdullah, 2002

Sumber: Fitter Abdullarly 2002

Masing-masing indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- b) Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c) Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
- d) Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

2. Keterbukaan

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah

tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional dan internasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
- b) Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
- c) Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ke seluruh penjuru dunia.
- d) Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.
- e) Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional.

3. Sistem Keuangan

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
- b) Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Modal fisik berupa infrastruktur, baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- b) Modal alamiah baik berupa kondisi geografi maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- c) Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapnya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip berikut:

- a) Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
- b) Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
- c) Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

6. Sumber Daya Manusia

Indikator sumber daya manusia dalam kal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
- b) Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- c) Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
- d) Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan aspek keamanan maupun mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a) Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.
- b) Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
- c) Aktivitas perekonomian suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

8. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Indikator *Governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor *governance* dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
- b) Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan risiko bisnis.
- c) Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.
- d) Efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
- e) Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.

9. Manajemen Ekonomi Makro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi makro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah di antaranya adalah:

- a) Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan manajerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
- b) Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah dimana perusahaan tersebut berada.
- c) Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
- d) Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
- e) Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

2.2.2. Variabel-Variabel Penentu Daya Saing

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pitter Abdullah (2002) dengan judul Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, masing-masing indikator utama daya saing daerah ke dalam variabel-variabel yang lebih rinci dilakukan selain berdasarkan studi literatur, juga metode delphi. Ringkasan jumlah variabel untuk masing-masing indikator utama daya saing daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1.

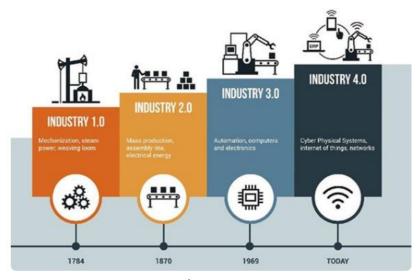
Jumlah dan Deskripsi Variabel Daya Saing Daerah
menurut Indikator Utama

	Indikator Utama	Jumlah Variabel	Deskripsi
1.	Perekonomian Daerah	22 variabel	Merupakan ukuran kinerja secara umum perekonomian daerah secara makro
2.	Keterbukaan	26 variabel	Mengukur seberapa jauh perekonomaian daerah terbuka terhadap perdagangan internasional dan perdagangan antar daerah
3.	Sistem Keuangan	12 variabel	Mengukur sebarapa baik sistem finansial, perbankan maupun lembaga keuangan non-bank dapat memfasilitasi aftivitas perekonomian daerah
4.	Infrastruktur dan Sumber daya Alam	24 variabel	Mengukur sebarapa besar sumber daya: modal fisik, letak geografis, sumber daya alam, mendukung aktivitas perekonomian daerah
5.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7 variabel	Mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam kegiatan ekonomi yang meningkatkan nilai tambah
6.	Sumber Daya Manusia	29 variabel	Mengukurketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang meningkatkan daya saing perekonomian daerah
7.	Kelembagaan	14 variabel	Mengukur seberapa kondusif iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan dalam mendukung perekonomian daerah
8.	Governance dan Kebijakan Pemerintah	24 variabel	Mengukur kualitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur fisik, peraturan serta aturan main dari kompetisi
9.	Manajemen dan Ekonomi Makro	32 variabel	Mengukur bagaimana perusahaan/industri di daerah tersebut dikelola secara inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab

Sumber: Peter Abdulah, 2022

2.3. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri adalah perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Revolusi Industri 4.0 ini juga merupakan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis, ketika terdapat perubahan cara hidup kerja manusia secara fundamental (Hamdan, 2018). Revolusi industri 1.0 dimulai ketika ditemukan mesin uap. Kemudian revolusi industri 2.0 dimulai ketika adanya pergantian penggunaan mesin uap ke mesin yang menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya revolusi industri 3.0 dimulai ketika proses produksi sudah menggunakan robot sederhana hingga penggunaan komputer. Sekarang ini revolusi industri sudah mencapai tahap yang lebih tinggi yakni revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini lebih maju karena sudah masuk pada era sistem digital. Perkembangan revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 adalah seperti yang tertera pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Perkembangan Revolusi Industri

Sumber: Sindonews.com

Istilah lain dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Semua bidang nantinya akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Salah satu karakteristik unik dari revolusi industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang industri. Pada era revolusi industri 4.0 ini paradigma bisnis bergeser dari penekanan *owning* menjadi *sharing*/kolaborasi (Prasetyo dan Trisyanti, 2018).

2.3.1. Prinsip Revolusi Industri 4.0

Prinsip Revolusi Industri 4.0 antara lain: 1) Interkoneksi yaitu kemampuan mesin, perangkat sensor dan orang untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui *internet of thing* (IoT). 2) Transparansi informasi yakni adanya kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk data dan penyediaan informasi; 3) Bantuan teknis, hal ini meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dalam membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. 4) Keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Berikut prinsip industri 4.0 pada Gambar 2.7.

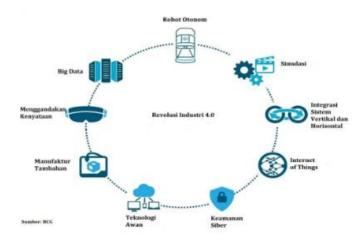


Gambar 2.7.
Prinsip Industri 4.0
Sumber: Herman, dkk, 2016

2.3.2. Teknologi Pendukung Revolusi Industri 4.0

Dalam berjalannya revolusi industri 4.0 ini didukung beberapa teknologi antara lain sebagai berikut (fti.bunghatta.ac.id):

- a. Big Data (Maha Data);
- b. Simulasi (Simulation);
- c. Integrasi Sistem (System Integration);
- d. Internet untuk Segala/Internet of Things (IoT);
- e. Cyber Security (Keamanan Siber);
- f. Komputasi Awan (Cloud Computing);
- g. 3D Printing/Additive Manufacturing;
- h. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence);
- i. Augmented Reality (AR)/Realita Tertambah.



Gambar 2.8.

Teknologi Pendukung dalam Revolusi Industri 4.0

Sumber: Agung Kristanto, 2019

Namun begitu, terdapat lima teknologi digital yang paling fundamental dalam penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia, yaitu IoT, artificial intelligence, wearables (augmented reality dan virtual reality), advanced robotics, dan 3D printing (Kemenperin.go.id, 2018).

2.3.3. Pengembangan Ekonomi Lokal di Era Revolusi Industri 4.0

Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Clayton (Christensen, 1997). Lahirnya revolusi industri 4.0 ini menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus dijalani. Salah satunya yakni lahirnya proses digitalisasi dalam segala bidang. Tak lain halnya dalam pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal di era ini perlu didukung dengan teknologi yang ada agar dapat meningkatkan daya saing daerah.

Sebelum ekonomi lokal dikembangkan, terlebih dahulu perlu ditentukan potensi yang ada dan dapat dikembangkan, terutama komoditas unggulan di daerah tersebut. Kemudian adanya potensi komoditas unggulan tersebut perlu didorong dengan berbagai fasilitas dan tentunya dukungan kelembagaan. Adanya kemajuan teknologi yang sudah sangat mudah diakses pada era revolusi industri 4.0 ini juga dapat menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan ekonomi lokal, contohnya yakni dengan menyediakan platform e-commerce.



Gambar 2.9.

Pemanfaatan Revolusi Industri dalam PEL
Sumber: Budharsono, 2017

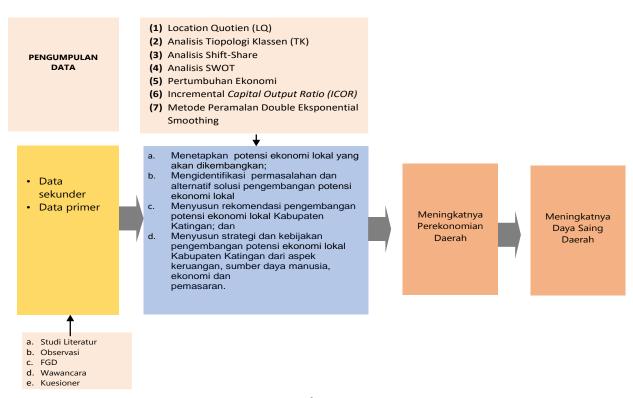
3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Di samping itu, penelitian merupakan aktivitas yang saksama dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang tersistematis dan tentunya bersifat objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu kesimpulan sementara. H.B. Sutopo (2002:5) menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan bentuk dan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai aspek penelitian atau pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas penelitian.

3.1. Kerangka Pikir Studi

Dari latar belakang, maksud, tujuan, dan landasan teori yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka kerangka pikir dalam studi ini disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kerangka Pikir Studi

3.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan (applied research) yaitu penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah-masalah praktis. Temuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu. Temuan berupa informasi yang diperlukan untuk pembuatan keputusan dalam pemecahan masalah-masalah pragmatis (Indriantoro & Supomo, 1999). Penelitian ini termasuk dalam penelitian mix method yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner dan penelitian kuantitatif yang dilakukan menggunakan perhitungan rasio maupun alat analisis statistik dan keuangan yang berasal dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh selama masa penelitian.

3.3. Jenis Data

Data yang hendak digali peneliti dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan dan melalui kuesioner. Data primer yang dibutuhkan. Pengumpulan data primer melalui survei lapangan (serta mendokumentasikan hasil pengamatan).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Penggalian data sekunder dilakukan dengan studi pustaka.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

- 1. *Desk Study,* meliputi studi literatur, kajian penelitian sejenis terdahulu, serta regulasi dan kebijakan terkait.
- 2. Observasi, melalui pengamatan langsung di lapangan.
- 3. Focus Group Discussion (FGD), dengan melakukan suatu diskusi yang dilakukan secara kelompok dan sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik.
- 4. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan pekerjaan ini.
- 5. Kuesioner, menyebarkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik studi kepada para responden.

3.5. Pelaporan

Laporan yang harus dipenuhi dalam kegiatan ini, antara lain:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan ini diserahkan pada hari ke-30 (tiga puluh) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) buku termasuk 1 (satu) asli, serta dibuat dalam format kertas A4. Laporan ini berisi tentang penjelasan rinci yang memuat:

- a. Latar Belakang;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Lingkup Kegiatan;
- d. Metode dan Konsep Pelaksanaan Kegiatan;
- e. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- f. Gambaran Umum Kawasan Perencanaan;
- g. Studi Pustaka.

2. Laporan Antara

Laporan ini diserahkan pada hari ke-75 (tujuh puluh lima) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) buku termasuk 1 (satu) asli, serta dibuat dalam format kertas A4. Laporan ini berisi tentang penjelasan rinci yang memuat hasil pengumpulan data dan analisis awal.

3. Konsep Laporan Akhir

Laporan ini diserahkan pada hari ke-105 (seratus lima) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani yaitu sebanyak 10 (sepuluh) buku termasuk 1 (satu) asli, serta dibuat dalam format kertas A4. Laporan ini berisi tentang penjelasan rinci yang memuat substansi dengan sistematika sebagai berikut.

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Kajian Pustaka;
- c. Bab III Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Bab IV Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal;
- e. Bab V Rencana Aksi Forum Pengembangan Ekonomi Lokal;
- f. Bab VI Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Katingan;
- g. Bab VII Arah, kebijakan dan strategi, pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Katingan dari aspek keruangan, sumber daya manusia, ekonomi, dan pemasaran;
- h. Bab VIII Penyusunan indikasi program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal;
- i. Bab IX Penutup.

4. Laporan Akhir

Laporan ini diserahkan pada hari ke-120 (seratus dua puluh) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani yaitu sebanyak 10 (sepuluh) buku termasuk 1 (satu) asli, serta dibuat dalam format kertas A4 dan menggunakan hard cover. Laporan akhir merupakan penyempurnaan dari Konsep Laporan Akhir setelah menerima masukan dan koreksi dalam seminar akhir.

5. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Laporan ini diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir yaitu pada hari ke-120 (seratus dua puluh) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani yaitu sebanyak 10 (sepuluh) buku termasuk 1 (satu) asli, serta dibuat dalam format kertas A4 dan menggunakan *hard cover*.

Semua laporan dari pendahuluan sampai akhir, ringkasan eksekutif (*Executive Summary*), serta semua data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini disampaikan dalam bentuk CD/DVD sebanyak 10 (sepuluh) buah.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

- Analisis Deskriptif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif dari hasil diskusi kelompok terfokus.
- Analisis Kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang berupa pernyataan atau data yang tidak berupa angka.
- Analisis Kuantitatif, yaitu analisis terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisis statistik, untuk menghitung kecenderungan (tren), grafik, dan diagram maupun persentase (%).

3.7. Alat Analisis

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Location Quotien

Analisis LQ merupakan metode yang digunakan untuk menghitung nilai tambah relatif suatu sektor terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala yang lebih tinggi. Istilah skala yang lebih tinggi dalam hal ini adalah wilayah induk suatu wilayah, misalnya apabila menghitung LQ suatu sektor pada wilayah kabupaten, maka skala yang lebih tinggi adalah skala provinsi atau nasional dan seterusnya (Tarigan, 2003). Berikut adalah rumus yang digunakan dalam analisis *location quotien*:

$$LQ_i = \frac{X_i^r/X^r}{X_i^n/X^n}$$

Keterangan:

X=Output (PDRB)

Xⁿ=Nasional

X^r=Output PDRB regional

Berdasarkan hasil dari analis LQ, maka dapat diartikan apabila:

- a. LQ_i > 1 mengindikasikan ada kegiatan ekspor di sektor tersebut atau sektor basis (B);
- b. LQ_i < 1 disebut sektor non-basis (NB).

2. Analisis Tipologi Klassen (TK)

Tipologi Klassen adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor, sub-sektor, usaha dan komoditas unggulan di suatu daerah. Tipologi Klassen dapat digunakan sebagai alat pembanding perekonomian suatu daerah dengan daerah lain atau secara nasional atau membandingkan pasar sektor, subsektor, usaha atau komoditas suatu daerah, dengan menggunakan nilai rata-rata di skala yang lebih tinggi. Analisis *Tipologi Klassen* merupakan gabungan antara analisis *Location Quotien* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni dengan menggunakan data PDRB sektoral maupun keseluruhan dalam daerah. Berikut adalah yang menggambarkan klasifikasi Klassen dengan pendekatan sektoral.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral

Kuadran I	Kuadran II			
Sektor maju dan tumbuh dengan pesat	Sektor maju tapi tertekan			
g _i >g ; s _i >s	$g_i < g ; s_i > s$			
Kuadran III	Kuadran IV			
Sektor potensial atau masih dapat berkembang	Sektor relatif tertinggal			
dengan pesat	$g_i < g$; $s_i < s$			
g _i >g ; s _i <s< td=""><td></td></s<>				

Sementara itu, pendekatan kedua dalam analisis *Tipologi Klassen* adalah pendekatan daerah (Sjafrizal, 1997). Pendekatan ini mempunyai konsep yang serupa dengan pendekatan sektoral dan data yang digunakan juga berupa data PDRB dan pertumbuhan per kapita. Berikut adalah tabel yang menggambarkan Tipologi Klassen dengan pendekatan daerah.

Tabel 3.2. Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Daerah

Kuadran I	Kuadran II
Daerah maju dan tumbuh dengan pesat	Daerah maju tapi tertekan
g _i >g ; gk _i >gk	g _i <g ;="" gk<sub="">i>gk</g>
Kuadran III	Kuadran IV
Daerah potensial atau masih dapat berkembang	Daerah relatif tertinggal
dengan pesat	g _i <g ;="" gk<sub="">i<gk< td=""></gk<></g>
g _i >g ; gk _i <gk< td=""><td></td></gk<>	

3. Analisis Shift-Share

Metode analisis ini dapat digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan (Tulus Tambunan, 1996). Teknik analisis ini diawali dengan perhitungan perubahan PDRB suatu sektor di suatu daerah antara 2 periode, yaitu:

Teknik analisis ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pangsa regional, pergeseran proporsional dan pergeseran yang berbeda, maka persamaan (1) dapat diperluas menjadi:

$$\Delta Q_{j} = Q_{j} \left\{ \frac{Y_{i}}{Y_{0}} - 1 \right\} + Q_{j} \left\{ \frac{Q}{Q} - \frac{Y_{i}}{Y_{0}} \right\} + Q_{j} \left\{ \frac{Q_{j}}{Q_{j}^{i}} - \frac{Q}{Q} \right\} \dots (2)$$

Persamaan (2) dapat dipisahkan menjadi 3 komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah:

$$RS_{ij} = Q_{ij}^{0} \left\{ \frac{Y_{t}}{Y_{0}} - 1 \right\} \qquad (3)$$

$$PS_{ij} = Q_{ij}^{0} \left\{ \frac{Q_{i}^{t}}{Q_{i}^{0}} - \frac{Y_{t}}{Y_{0}} \right\} \qquad (4)$$

$$DS_{ij} = Q_{ij}^{0} \left\{ \frac{Q_{ij}^{t}}{Q_{ij}^{0}} - \frac{Q_{i}^{t}}{Q_{i}^{0}} \right\} \qquad (5)$$

Dimana:

Yt= PDRB Kabupaten periode tahun t

Y0= PDRB Kabupaten pada periode tahun dasar

Qit= PDRB Kabupaten sektor i pada tahun t

Qi0= PDRB Kabupaten sektor i pada tahun dasar

Qijt= PDRB SWP sektor i pada tahun t

Qij0= PDRB SWP sektor i pada tahun dasar

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa bila:

- 1) PS < 0 maka sektor tersebut tumbuh relatif lambat di tingkat Kabupaten.
- 2) PS > 0 maka sektor tersebut tumbuh relatif cepat di tingkat Kabupaten.
- 3) DS < 0 maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di daerah lain atau dengan kata lain sektor tersebut tidak mempunyai keuntungan lokasional yang baik.
- 4) DS > 0 maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah lain atau dengan kata lain sektor tersebut mempunyai keuntungan lokasional yang baik.
- 5) RS < "Qtij maka pertumbuhan produksi di daerah tersebut cenderung mendorong pertumbuhan Kabupaten.
- 6) RS > "Qtij maka pertumbuhan produksi di daerah tersebut cenderung akan menghambat pertumbuhan provinsi.

4. Analisis SWOT

Rangkuti (2016) menyebutkan bahwa metode analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (opportunities dan threads) untuk dapat diantisipasi dan disesuaikan dengan faktor internal (strength dan weakness) dalam merumuskan suatu strategi. Rangkuti dalam Ridwan (2020) memaparkan bahwa hasil dari analisis SWOT akan memunculkan 4 (empat) macam strategi alternatif yakni:

- (1) Strategi S-O, membangun kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh institusi untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*) yang ada;
- (2) Strategi S-T, pembangunan strategi alternatif yang digunakan dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*) untuk menghadapi ancaman (*threats*);
- (3) Strategi W-O, pembangunan strategi yang dilakukan dengan meminimalisir kelemahan (*weakness*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*);
- (4) Strategi W-T, pembangunan strategi yang dilakukan dengan mengantisipasi kelemahan (*weakness*) untuk menghadapi ancaman (*threats*).

Berikut adalah matriks yang menggambarkan strategi alternatif yang didapatkan berdasarkan hasil analisis SWOT.

Tabel 3.3.
Matriks Strategi SWOT

Internal Eksternal	Strength (S)	Weakness (W)
Opportunities (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Threads (T)	Strategi S-T	Strategi W-T

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian daerah akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Hasil analisis yang lebih baik memerlukan analisis terhadap pertumbuhan PDRB secara sektoral untuk mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan PDRB dapat berasal dari pertumbuhan pemintaan untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, maupun impor. Di samping itu dari sisi penawaran, pertumbuhan tersebut bisa disebabkan oleh pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB) di tiap-tiap lapangan usaha. Metode sederhana untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tahunan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$r_{(t-1,t)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} X100\%$$
 (8)

r adalah pertumbuhan ekonomi tahunan. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode yang lebih panjang maka tingkat pertumbuhan per-tahun harus dihitung terlebih dulu dan kemudian dirataratakan (misal saja selama tiga tahun) sebagai berikut:

$$r = \frac{r_{(t-1-t)} + r_{(t-1+t)} + r_{(t+1-t-2)}}{3}$$
 (9)

6. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor produksinya. Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi seyogyanya dihubungkan dengan perkembangan faktor-faktor produksinya. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR menghubungkan besarnya Pembentukan

Modal Tetap Domestik Bruto dengan pertambahan PDRB. Cara menghitung besarnya ICOR sebagai berikut:

$$ICOR_{(t1-t2)} = \frac{PMTRB_{t1}}{PDRB_{t-2} - PDRB_{t-1}}$$
 (10)

Di mana:

PMTRB = Pembentukan Modal Tetap Regional Bruto

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto t = Menunjukkan waktu (periode)

1 = Masa tenggang, biasanya diasumsikan 1 tahun

Variabel-variabel di atas dinyatakan dalam harga konstan.

7. Metode Peramalan Double Exponential Smoothing

Dalam kajian ini akan digunakan metode double exponential smoothing karena dianggap lebih cocok untuk meramalkan data yang mengalami tren naik. Metode exponential smoothing mempunyai sifat dasar yaitu memberikan bobot yang relatif besar terhadap nilai yang baru dibanding nilai yang lama (Makridakis, 1993:79). Rumus yang digunakan untuk menghitung metode double exponential smoothing sebagai berikut:

$$S_{t+m} = a_t + b_m$$
, dimana $a_t = 2S_t - S_t dan b_t = \frac{a}{1-a} (S_t - S_t)$ (12)

Keterangan:

 S_{t+m} = Forecast untuk periode ke t+m

M = Jangka Waktu forecast kedepan (Jangka waktu yang akan diperhitungkan)

a dan b= koefisien persamaan forecast

$$S_{t}' = aX_{t} + (1-a)S_{t-1}''$$

$$S_t'' = aS_t'(1-a)S_t''$$

Keterangan:

S' = Single exponential Smoothing pada periode ke-t

 $S_t^{"}$ = Double Exponential Smoothing pada period ke-t

 S_{t-1} = Single exponential smoothing pada period ke-t-1

 $S_{t_1}^{"}$ = Double exponential smoothing pada period ke-t-1

xt = Data tahun k-t

Penggunaan nilai a biasanya antara 0 dan 1, jika a mendekati 1 berarti data terakhir lebih diperhatikan (diberi weight lebih besar) dari pada sebelumnya.

3.8. Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis (SIG)

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, agar hasilnya lebih komprehensif maka data dan potensi yang ada di setiap kawasan akan diolah dan ditampilkan melalui *Geographic Information System (GIS)* atau Sistem Informasi Geografis (SIG) yang diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka Sistem Informasi Geografis pada hakikatnya dapat berfungsi sebagai:

- 1. Bank Data Terpadu
 - Mempermudah data kartografi dengan data atribut dalam sistem manajemen basis data relasional sehingga memungkinkan memanipulasi berbagai suatu kesatuan.
- 2. Sistem *Modelling* dan Analisa
 - Dapat dipergunakan sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial (tata ruang dan tata lingkungan).
- 3. Sistem Pemetaan Otomatis
 - Automatted Mapping yang dapat menyajikan peta sesuai kebutuhan, baik dalam arti tujuan maupun ketentuan kartografi.
- 4. Sistem Pengelolaan Bergeoreferensi
 - Bertujuan untuk pengelolaan operasional dan administrasi yang berwujudkan lokasi geografis. Salah satu sistem informasi yang telah berkembang dewasa ini adalah SIG (Sistem Informasi Geografi). Salah satu perbedaan utama SIG dengan sistem Informasi lainnya adalah kemampuannya dalam mengelola atribut lokasi/referensi geografis bersamaan dengan atribut lainnya (*spatial analysis* dalam bentuk peta digital).

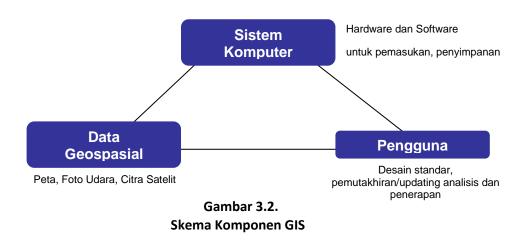
Sistem Informasi Geografis memiliki kemampuan dalam mendeskripsikan data geografis. Pada dasarnya Sistem Informasi Geografis dapat menerima tiga komponen data, yaitu:

- 1. Data spasial/data geografis yang berkaitan dengan koordinat tertentu.
- 2. Data non spasial (atribut), yang tidak berkaitan dengan posisi berupa tematema tertentu seperti warna, tekstur, jenis lahan, dan sebagainya.
- 3. Hubungan antara data spasial atribut dan data waktu yang saling berkaitan.

Data geografis dalam Sistem Informasi Geografis cukup kompleks, karena mengandung informasi tentang posisi dan topologi (keterkaitan antara elemen-elemen geografis) dari data tersebut. Untuk memberikan informasi yang lengkap tentang data spasial yang mengacu pada *feature*/obyek yang sesuai dengan keadaan di permukaan bumi maka diperlukan pengikatan antara kedua komponen di atas.

3.8.1. Komponen GIS

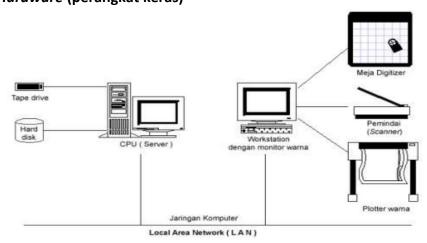
Secara skematis komponen kunci dalam GIS dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Suatu proyek GIS dapat berhasil jika dikelola melalui manajemen yang baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat.

b. Hardware (perangkat keras)



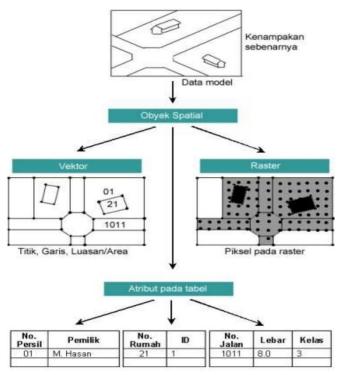
Gambar 3.3.
Komponen Perangkat Keras/Hardware dalam Sistem GIS

c. Software (Perangkat Lunak)

Banyak sekali macam *software* untuk aplikasi SIG yang beredar saat ini. Ada yang berbasis vektor dan ada pula yang berbasis raster. *Software* SIG yang berbasis vektor antara lain Arc Info, Map Info, Auto Cad Map, dan lain-lain. *Software* SIG yang berbasis raster antara lain ILWIS, Idrisi, GRASS, ERDAS, dan lain-lain.

d. Prosedur dan Data

GIS dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Sumber-sumber data geospasial adalah peta digital, foto udara, citra satelit, tabel statistik, dan dokumen lain yang berhubungan. Data geospasial dibedakan menjadi data grafis (atau disebut juga data geometris) dan data atribut (data tematik). Data grafis mempunyai tiga elemen: titik (node), garis (arc), dan luasan (poligon) dalam bentuk vektor ataupun raster yang mewakili geometri topologi, ukuran, bentuk, posisi, dan arah.



Gambar 3.4. Konsep Data Geo Spasial

3.8.2. Memulai Project Otomasi Data

Setelah membuat desain database yang pasti maka dapat dimulai membangunnya dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk proyek (yaitu, layer dan atribut hasil identifikasi pada tahap desain). Pengumpulan layer yang tersedia dalam format digital dilakukan sebagai coverage. Untuk layer yang tidak tersedia dalam format digital, harus dikumpulkan dari peta manuskrip yang terbaik untuk diotomasikan.

a. Organisasi Workspace dan Ketentuan Penamaan

Sebelum mulai pengembangan *database*, ide yang baik adalah menentukan organisasi *workspace* yang berisi *coverage*, *file*, dan peta yang akan dibuat. Di samping itu, harus membuat beberapa ketentuan pemberian nama *coverage* dan file. Hal ini dikarenakan membantu dalam mengelola data untuk proyek secara efisien. Skema organisasi *workspace* khusus meliputi direktori proyek, direktori yang *workspace* untuk setiap layer berada. Dengan cara ini proyek yang dibuat akan lebih mudah dan lebih efisien serta lebih terstruktur.

b. Mem-back up Data

Back up data lebih sering dilakukan untuk akhir yang sedang menjalani pemrosesan ekstensif. Hal ini untuk memastikan bahwa data tidak hilang akibat kegagalan pemakaian komputer atau penghapusan yang tidak sengaja. Sebaiknya juga dilaksanakan semua pemrosesan pada copy dari data yang ada. Setelah coverage diproses dengan sukses, coverage awal atau coverage duplikat dapat dihapus.

3.8.3. Operasi Sistem

Pada tahap ini perlu dibangun sistem terdiri dari *database* komprehensif yang dapat memenuhi bermacam-macam kebutuhan pemakai di dalam area geografik spesifik. *Database* dapat digunakan tidak hanya untuk proyek khusus, tetapi juga untuk pekerjaan yang berkesinambungan. Pembangunan sistem aplikasi meliputi:

a. Menyusun Penilaian Kebutuhan Pemakai

Tahap pertama dalam pendesainan sistem aplikasi adalah menyusun penilaian kebutuhan pemakai dengan cermat. Tahap ini dapat berupa wawancara dengan pemakai sistem yang potensial untuk memastikan data yang diperlukan untuk pekerjaannya.

b. Desain Rancang Bangun Sistem Lanjutan

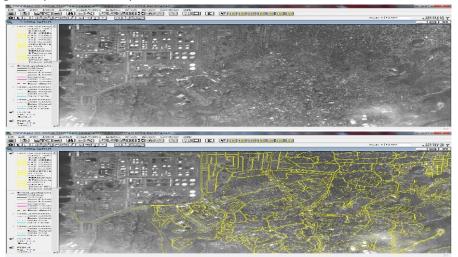
Desain Basis Data dalam pembangunan sistem aplikasi ini merupakan kelanjutan dari desain Rancang Bangun Sistem yang desain Rancang Bangun Sistem yang telah dibuat pada awal pembuatan proyek.

3.8.4. Memasukkan Data Spasial Ke Dalam Format Digital

Tahap berikutnya dalam pembangunan database adalah mengotomasikan data, yaitu mengonversi data *feature* pada peta menjadi format digital pada komputer. Peta digital sering disebut *coverage* dan proses pengambilan data spasial secara manual disebut digitasi. Untuk mendigitasi secara efektif, harus mampu membedakan jenis obyek yang ada pada peta. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengotomasikan data spasial pada peta meliputi:

a. Pengambilan Data

Data pada peta dapat diambil dengan mendigitasi setiap *feature* satu demi satu atau dengan menggunakan *scanner* elektronik untuk mengambil keseluruhan lembar *feature*. Data dalam bentuk nilai koordinat dapat juga diambil dengan mengetik koordinat -x dan -y yang eksak. Masing-masing dari pilihan ini memerlukan beberapa persiapan sebelum dapat diinterpretasi dengan tepat oleh komputer.



Gambar 3.5.
Proses *Input* Data Spasial ke Dalam Format Digital Melalui Digitasi

b. Digitasi

Digitasi merupakan proses pengkonversian *feature* spasial pada peta ke dalam format digital. *Feature* titik, garis, dan area yang membentuk peta dikonversikan ke dalam koordinat x, y. Titik disajikan oleh koordinat tunggal, garis dengan deret koordinat, dan bila dikombinasikan, satu atau lebih garis dengan titik label di dalam garis luar dan mengidentifikasi area (poligon). Jadi, digitasi adalah prosedur pengambilan rangkaian titik dan garis.

3.8.5. Mendayagunakan Data Spasial

Sebagai kelanjutan proses otomasi data, sekarang perlu dipastikan apakah data pada *coverage* yang baru didigitasi bebas dari kesalahan spasial, secara khusus, perlu dijamin bahwa:

- 1. Semua feature benar-benar telah didigitasi seluruhnya;
- 2. Semua feature telah ada, yang memang seharusnya ada;
- 3. *Feature* berada pada tempat yang benar dan mempunyai bentuk yang benar;
- 4. Feature dihubungkan dengan yang sebenarnya;
- 5. Semua poligon mempunyai satu, dan hanya satu titik label; dan
- 6. Semua feature terletak di dalam batas terluar.



Gambar 3.6.
Contoh Data Spasial (Data Vektor) yang Telah Bebas dari Kesalahan Digitasi

3.8.6. Memasukkan Data Atribut

Pada tahap ini akan dilanjutkan pembangunan database untuk proyek sebelum pelaksanaan analisis dan pembuatan peta akhir. Hingga kini telah mengembangkan desain database dan mengotomasikan peta yang diperlukan. Selain itu, juga telah mengoreksi kesalahan pada data hasil digitasi dan membuat topologi coverage. Sebelum analisis dapat dikerjakan, masih harus menentukan informasi data tambahan, yang perlu ditambahkan atribut deskriptif ke coverage yang ada. Atribut ini meliputi kode yang menunjukkan jenis informasi pada setiap obyek feature. Setiap feature geografis pada coverage mempunyai record yang berkaitan pada tabel atribut feature.

a. Menggunakan Tables untuk Membuat File Data Tabuler

Parameter spesifik yang harus ditentukan untuk menangani data deskriptif pada setiap coverage, meliputi:

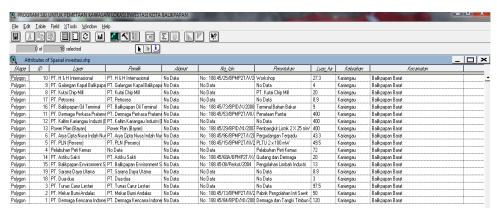
- 1) Nama atribut;
- 2) Jenis atribut (karakter atau numerik);
- 3) Jumlah *space* penyimpanan yang diperlukan untuk setiap atribut. Jenis item atribut yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu C (Karakter) dan N (numerik). Nilai untuk atribut yang mempunyai karakter non numerik dipakai jenis item C (karakter). Sedangkan untuk atribut yang mempunyai nilai numerik dengan atau tanpa titik desimal digunakan jenis item N (numerik).

b. Menggunakan TABLES untuk Memasukkan Atribut Deskriptif

Penambahan nilai data atribut dapat dilakukan dengan mengetik informasi tersebut pada file data yang telah tersedia. Beberapa menu sebagai fasilitas dari program GIS tersedia yang digunakan untuk memasukkan dan menambah atribut. Salah satunya dengan menggunakan perintah ADD untuk memasukkan atribut ke dalam file data.

c. Menggunakan Program GIS untuk Menghubungkan Atribut ke Feature

Hubungan di antara setiap *feature* geografis dan *record* yang bersangkutan pada tabel atribut ditentukan secara otomatis. Bila atribut tambahan yang terdapat pada file data baru digabungkan ke PAT, file ini juga dihubungkan secara otomatis ke *feature* geografis. Penggabungan secara fisik file data ke tabel atribut *feature* didasarkan pada item yang sama-sama digunakan.



Gambar 3.7.
Contoh Masukan Database (Data Atribut) ke Dalam Peta Digital

3.8.7. Mengelola Database

Tujuan dari tahap ini adalah mengakhiri pembangunan *database* proyek dan untuk menjamin fungsionalitasnya. *Database* fungsional berisi sejumlah *coverage* yang berkaitan dengan karakter berikut:

- a. Keakuratan dari semua lokasi feature telah diperiksa;
- b. Tabel atribut feature tersedia;
- c. Keakuratan nilai atribut feature telah diperiksa;
- d. Sistem dari tic atau titik kontrol lapangan tersedia.

3.8.8. Melaksanakan Analisis SIG

Pada tahap ini merupakan fase analisis dari proyek yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi potensial di dalam area studi. Setiap layer pada database berisi informasi spesifik yang diperlukan untuk analisis penentuan lokasi. Untuk mengidentifikasi hubungan baru di antara layer data, diperlukan pengolahan informasi tersebut lebih lanjut. Analisis geografis memungkinkan untuk mempelajari proses bumi yang sebenarnya dengan mengembangkan dan mempergunakan model. Model ini menjelaskan kecenderungan yang utama pada data geografis sehingga menyediakan data baru. SIG mempertajam proses ini dengan menyediakan alat yang dapat dikombinasikan dengan urutan yang berdaya guna untuk mengembangkan model baru. Model ini mengungkapkan hubungan baru atau hubungan yang tidak teridentifikasi sebelumnya di dalam dan di antara kumpulan data sehingga meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang ada di permukaan bumi yang sebenarnya. Hasil dari analisis geografi dapat dikomunikasikan melalui peta, laporan, atau keduanya. Peta adalah alat terbaik yang digunakan untuk menampilkan hubungan geografi, sedangkan laporan sangat sesuai untuk meringkas data tab uler dan mendokumentasikan nilai hasil perhitungan.

3.8.9. Menyajikan Hasil Analisis SIG

Tahapan terakhir adalah menyajikan peta-peta yang telah disusun. Peta-peta tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga menarik, komunikasi, dan informatif. Selain disajikan dalam bentuk *hardcopy* peta, untuk efektivitas dan efisiennya perlu dipresentasikan produk secara visual secara digital. Visualisasi lewat monitor komputer memerlukan perancangan program-program GIS yang memudahkan operator mengoperasikan program GIS memperbaharui data dan memodifikasi data maupun tampilan.

Hasil analisis suatu rencana pekerjaan yang didasarkan pada data yang salah atau kurang tepat, akan menghasilkan kesimpulan yang salah pula. Di lain pihak, teknologi GIS telah digunakan untuk menunjang berbagai fungsi pemerintahan (pusat maupun daerah). Semakin banyak pemanfaatan GIS dalam menunjang berbagai fungsi pemerintahan yang kemudian dihadapkan pada mutu data, menyebabkan konsepsi sharing data sudah harus mulai menjadi pertimbangan dalam membangun basis data untuk GIS.

3.9. Metode dan Konsep Pelaksanaan Kegiatan

Konsep pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

a. Tahap Persiapan Pekerjaan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka acuan kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan tugas dan pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan bagi personil yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini dimaksudkan agar para personil dapat bekerja secara efisien dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi, menyusun program/rencana kerja, perumusan substansi secara garis besar, penyiapan checklist data dan kuesioner, serta metode pendekatan.

b. Tahap Penyusunan Laporan Pendahuluan

Hasil dari persiapan pekerjaan selanjutnya dituangkan ke dalam laporan pendahuluan. Laporan Pendahuluan merupakan laporan awal yang dibuat dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan yang berisikan rencana kerja, ketersediaan data, metode kerja/pendekatan, mobilisasi tenaga ahli/pendukung, jadwal kegiatan, serta langkah-langkah lainnya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

c. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Data primer, berupa data hasil wawancara, kuesioner, maupun FGD dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Data sekunder, berupa data dokumenter yang disediakan oleh instansi pemerintah ataupun lembaga lain.

d. Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data dan informasi ini meliputi:

- 1) Pengorganisasian data;
- 2) Pengolahan data; dan
- 3) Penyajian data.

e. Tahap Laporan Antara

Hasil pengolahan data selanjutnya dituangkan dalam laporan antara. Laporan ini berisi tentang penjelasan rinci yang memuat hasil pengumpulan data dan analisa awal.

f. Tahap Analisis

Teknis analisis data yang dipergunakan dalam kajian ini meliputi:

- 1) Analisis Deskriptif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif dari hasil diskusi kelompok terfokus;
- 2) Analisis Kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang berupa pernyataan atau data yang tidak berupa angka; dan
- 3) Analisis Kuantitatif, yaitu analisis terhadap data yang berupa angkaangka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisis statistik, untuk menghitung kecenderungan (*trend*), grafik dan diagram maupun persentase (%).

g. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan akhir yang berisi tentang penjelasan rinci dari kegiatan yang dilaksanakan.

h. Tahap Penyempurnaan Laporan Akhir dan Executive Summary

Tahap ini merupakan penyempurnaan dari pembuatan laporan akhir yang telah dibuat. Kemudian *Executive Summary* merupakan ringkasan dari pembahasan dan analisa seluruh aspek pada ruang lingkup kegiatan.

3.10. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Secara keseluruhan, waktu yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan Master Plan Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Katingan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0 Kabupaten Katingan selama 120 hari kalender/4 bulan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (*Work Plan*) yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini selengkapnya disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

			ular	ı ke	1	В	ular	ı ke	2	В	ular	ı ke	3	В	ular	ı ke	4
No	Kegiatan		Min	ggu	ı	Minggu		Minggu			1	Minggu					
		1	2	თ	4	1	2	3	4	1	2	თ	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan																
	Persiapan dan mobilisasi																
	tenaga ahli																1
	Pemilihan metode kerja																
	Rencana pelaksanaan																
	pekerjaan																1
2.	Pengumpulan Data Awal																1
	(Inventarisasi Studi dan																
	Data Sekunder)																i
3.	Kajian Peraturan																
	Perundang-undangan																
4.	Tahap Penyusunan Laporan																
	Pendahuluan																

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

		В	ular	ı ke	1	Bulan ke 2			Bulan ke 3			Bulan ke 4					
No	Kegiatan		Min	ggu			Min	ggu			Min	ggu			Min	ggu	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	FGD 1																
6.	Observasi Daerah Studi																
7.	Survei Data Primer																
8.	Analisis Data Primer																
9.	Tahap Penyusunan Laporan																
	Antara																
10	FGD 2																
11	Analisis Data Komprehensif																
12	Pelaksanaan Forum PEL 1																
13	FGD 3																
14	Konsep Laporan Akhir																
15	Revisi Konsep Laporan Akhir																
16	Finalisasi Laporan Akhir &																
	Ringkasan Eksekutif																

Bab

4

GAMBARAN UMUM KAWASAN PERENCANAAN

Lokasi kajian ini nantinya akan dilakukan di Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten yang beribu kota di Kasongan ini memiliki luas wilayah 17.800 km². Dalam perkembangan setelah dilakukan kesepakatan tata batas dengan daerah sekitarnya, luas administrasi Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi 20.410,90 km². Kabupaten Katingan berpenduduk sebanyak 162.239 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020). Gambaran potensi ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Katingan dijabarkan sebagai berikut.

4.1. Produk Domestik Bruto Kabupaten Katingan

Dalam lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Katingan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan & industri pengolahan. Selanjutnya, juga terdapat sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang secara berurutan menjadi penyumbang terbesar kedua dan ketiga dari PDRB Kabupaten Katingan. Secara lengkap hal ini seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.
PDRB Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Katingan

Jenis Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Katingan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)							
	2019	2020	2021					
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.428.582,30	1.396.389,10	1.429.135,00					
B. Pertambangan dan Penggalian	352.931,10	240.293,20	185.091,70					
C. Industri Pengolahan	770.771,10	772.056,30	795.783,20					
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.681,20	1.835,20	1.917,60					
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.066,30	2.285,10	2.527,50					
F. Konstruksi	613.616,40	560.440,80	607.571,50					
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	371.513,10	368.719,40	373.027,60					
H. Transportasi dan Pergudangan	347.747,00	346.019,70	384.144,40					
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106.615,70	104.594,40	112.170,00					

Jenis Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Katingan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)							
	2019	2020	2021					
J. Informasi dan Komunikasi	50.559,80	60.540,50	67.489,50					
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	62.299,90	71.156,60	77.274,30					
L. Real Estate	138.661,70	135.130,90	121.409,90					
M,N. Jasa Perusahaan	772,5	688,1	693,1					
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	330.627,10	322.693,20	345.209,30					
P. Jasa Pendidikan	289.516,70	305.350,60	317.275,40					
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.984,60	144.476,70	154.471,90					
R,S,T,U. Jasa Lainnya	113.273,90	111.636,60	112.287,50					
PDRB	5.110.220,50	4.944.306,20	5.087.479,30					

Sumber: BPS Kab. Katingan, 2022

4.2. Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2019 terdepresiasi. Kemudian perekonomian di Kabupaten Katingan pada tahun 2020 semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang terlihat dari laju pertumbuhannya sebesar -3,25. Akan tetapi, pada tahun 2021 laju pertumbuhan sudah kembali membaik. Kemudian untuk laju pertumbuhan tiap sektor yang ada di Kabupaten Katingan pada lima tahun terakhir terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan di Kabupaten Katingan

Jenis Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)							
	2019	2020	2021					
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.57	-2.25	2.35					
B. Pertambangan dan Penggalian	-11.05	-31.91	-22.97					
C. Industri Pengolahan	9.57	0.17	3.07					
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.09	9.16	4.49					
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.21	10.59	10.61					
F. Konstruksi	5.03	-8.67	8.41					
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.35	-0.75	1.17					
H. Transportasi dan Pergudangan	7.70	-0.50	11.02					
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.71	-1.90	7.24					
J. Informasi dan Komunikasi	11.54	19.74	11.48					
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8.41	14.22	8.60					
L. Real Estate	8.01	-2.55	-10.15					
M,N. Jasa Perusahaan	7.24	-10.92	0.73					

Jenis Lapangan Usaha	· ·	mbuhan Produk Domestik Regional Bruto Katingan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2019 2020 2021							
O. Administrasi Pemerintahan,								
Pertahanan, dan Jaminan Sosial	6.57	-2.40	6.98					
Wajib								
P. Jasa Pendidikan	8.62	5.47	3.91					
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	8.97	12.01	6.92					
Sosial	0.97	12.01	0.92					
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9.18	-1.45	0.58					
PDRB	5.81	-3.25	2.90					

Sumber: BPS Kab. Katingan, 2022

4.3. Hasil Perhitungan LQ di Kabupaten Katingan

Setelah dilakukan perhitungan LQ pada PDRB Harga Konstan di Kabupaten Katingan tahun 2017-2021 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sektor yang basis (berpotensi untuk diekspor). Adapun beberapa sektor yang basis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Hasil Perhitungan LQ di Kabupaten Katingan

Lapangan Usaha	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Basis
Pertambangan dan Penggalian	Non Basis
Industri Pengolahan	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Non Basis
Konstruksi	Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Basis
Informasi dan Komunikasi	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	Non Basis
Real Estate	Basis
Jasa Perusahaan	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Basis
Jasa Pendidikan	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Basis
Jasa lainnya	Basis

Sumber: BPS, diolah

4.4. Kredit yang Diberikan untuk UMKM

Berjalannya UMKM di suatu daerah perlu dukungan finansial. Hal ini terwujud dalam bentuk kredit yang diberikan bagi UMKM yang ada di suatu daerah. Bank Indonesia mencatat bahwa pada Januari 2021, posisi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberikan bank mencapai 583,22 milyar rupiah (BPS Kab. Katingan,

2022). Jumlah kredit usaha yang berhasil diberikan oleh Bank Umum ke UMKM di Kabupaten Katingan pada tahun 2021 terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum menurut Bulan di Kabupaten Katingan (Juta Rupiah) Tahun 2021

		2021					
Bulan		Kriteria Usaha					
Month	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah			
Januari/ <i>January</i>	112.489	218.761	251.966	583.216			
Februari/ <i>February</i>	108.562	217.121	263.014	588.697			
Maret/ <i>March</i>	110.431	216.994	266.083	593.508			
April/April	109.375	226.954	281.655	617.985			
Mei/ <i>May</i>	110.228	228.709	279.572	618.510			
Juni/June	116.627	229.982	281.803	628.412			
Juli/ <i>July</i>	121.822	234.974	281.186	637.981			
Agustus/August	144.361	240.118	278.792	663.271			
September/ September	144.159	217.539	84.976	446.674			
Oktober/ <i>October</i>	142.183	251.033	349.672	742.888			
November/November	138.528	257.841	346.171	742.542			
Desember/ <i>December</i>	259.813	264.608	326.623	851.043			

Sumber: BPS Kab. Katingan

Bab

5

ANALISIS SEKTOR DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

5.1. Analisis Perekonomian dan Sektor Unggulan Daerah

Analisis perekonomian dan sektor unggulan daerah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada beberapa data. *Pertama*, produk domestik bruto regional menurut lapangan usaha sub sektor atas dasar harga konstan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2021. *Kedua*, produk domestik bruto regional menurut lapangan usaha sub sektor atas dasar harga konstan di Kabupaten Katingan tahun 2019-2021. *Ketiga*, hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ). *Keempat*, hasil perhitungan *shift share*. *Kelima*, hasil perhitungan tipologi klassen.

Berdasarkan data produk domestik bruto regional menurut lapangan usaha sub sektor atas dasar harga konstan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2021. Produk Domestik Bruto Regional Provinsi Kalimantan sebesar Rp102.294.500 juta pada tahun 2021. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp98.933.600 juta. Kenaikan ini tidak terlepas dari adanya berbagai skema program pemulihan ekonomi nasional dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Produk Domestik Bruto Regional Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Merujuk kontribusi sektor dan sub sektor produk domestik regional bruto Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi sebesar Rp21.920.500 juta. Dari besaran kontribusi sektor tersebut, sub sektor—pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian-merupakan sub sektor dengan kontribusi tertinggi sebesar Rp18.931.300 juta. Kemudian, sub sektor perikanan dengan kontribusi sebesar Rp1.990.300 juta serta sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dengan kontribusi sebesar Rp.998.800 juta.

Sektor kedua yang memiliki kontribusi terbesar terhadap produk domesti regional bruto Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 adalah sektor industri pengolaan dengan kontribusi sebesar Rp16.006.600 juta. Sektor ketiga adalah pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar Rp14.315.100 juta. Pada sektor pertambangan dan penggalian, sub sektor pertambangan batubara dan lignit adalah kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar Rp10.150.000 juta. Kemudian, sub sektor pertambangan biji logam dengan kontribusi sebesar Rp2.518.100 juta serta sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya dengan kontribusi sebesar Rp767.600 juta.

Berikut ini merupakan tabel produk domestik bruto regional menurut lapangan usaha sub sektor atas dasar harga konstan Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2019 sampai 2021.

Tabel 5.1

Produk Domestik Bruto Regional Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor Atas Dasar Harga
Konstan Provinsi Kalimantan Tengah (Juta Rupiah)

Lapangan usaha	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.250.800	21.298.900	21.920.500
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan			
Jasa Pertanian	18.545.600	18.537.400	18.931.300
Kehutanan dan Penebangan Kayu	839.200	882.700	998.800
Perikanan	1.866.000	1.878.800	1.990.300
Pertambangan dan Penggalian	15.518.400	14.038.700	14.315.100
Pertambangan Batubara dan Lignit	10.961.800	9.550.900	10.150.000
Pertambangan Bijih Logam	2.967.200	2.939.400	2.518.100
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	773.800	758.500	767.600
Industri pengolahan	15.388.500	15.374.000	16.006.600
Pengadaan Listrik dan Gas	86.300	102.500	105.500
Ketenagalistrikan	83.300	99.600	102.600
Pengadaan Gas dan Produksi Es	3.000	2.900	2.900
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,			
Limbah dan Daur Ulang	79.800	85.000	90.900
Konstruksi	8.578.300	7.745.400	8.387.700
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi			
Mobil dan Sepeda Motor	12.018.500	11.911.500	12.182.700
Transportasi dan Pergudangan	6.489.200	6.252.900	6.519.800
Penyediaan Akomodasi dan Makan			
Minum	1.722.300	1.643.900	1.687.300
Informasi dan Komunikasi	1.203.900	1.340.900	1.573.400
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.153.000	3.455.600	3.683.900
Real Estate	1.956.900	1.959.900	2.012.300
Jasa Perusahaan	37.400	32.200	32.800
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan			
dan Jaminan Sosial Wajib	5.828.000	6.291.900	6.098.700
Jasa Pendidikan	4.332.000	4.565.200	4.623.200
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.731.900	1.898.700	2.140.200
		224 222	042.000
Jasa lainnya	972.900	891.300	913.900

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Merujuk data produk domestik bruto regional menurut lapangan usaha sub sektor atas dasar harga konstan di Kabupaten Katingan tahun 2019-2021. Bahwa, besaran produk domestik regional bruto Kabupaten Katingan mengalami peningkatan menjadi Rp5.087.479,3 juta pada tahun 2021. Jumlah ini mengalami peningkatan jika

dibadingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.944.306,2 juta. Capaian besaran produk domestik bruto regional Kabupaten Katingan pada tahun 2021 masih lebih rendah jika dibandingkan besaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp 5.110.220,5 juta. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Katingan masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca terjadinya *shock* akibat pandemi Covid-19.

Kontributor terbesar pada produk domestik bruto regional Kabupaten Katingan pada tahun 2021 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar Rp1.429.135 juta. Dari sektor ini, sub sektor—pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian—merupakan kontributor tersebesar sebesar Rp989.034 juta. Kedua adalah sub sektor perikanan dengan kontribusi sebesar Rp275.992,3 juta serta sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dengan kontribusi sebesar Rp164.108,8 juta.

Sektor kedua yang memiliki kontribusi tersbesar terhadap produk domestik bruto regional Kabupaten Katingan pada tahun 2021 adalah sektor industri pengolaan dengan kontribusi sebesar Rp795.783,2 juta. Ketiga adalah sektor kontruksi dengan kontribusi sebesar Rp607.571,5 juta. Berdasarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Katingan dengan merujuk data produk domestik bruto regional Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan, bahwa terdapat pola yang sama bahwa sektor terbesar yang berkonribusi pada tahun 2021 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan sub sektor—pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertaian sebagai sub sektor yang menjadi kontributor terbesar. Artinya, dari data ini dapat tergambarkan bahwa sub sekor—pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian—merupakan sub sektor yang memiliki peran penting penggerak aktivitas perekonomian di Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 5.2

Produk Domestik Bruto Regional Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor Atas Dasar Harga
Konstan Kabupaten Katingan (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.428.582,3	1.396.389,1	1.429.135,0
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan	1.005.903,7	999.632,0	989.034,0
Jasa Pertanian			
Kehutanan dan Penebangan Kayu	175.859,0	152.596,9	164.108,8
Perikanan	246.819,6	244.160,2	275.992,3
Pertambangan dan Penggalian	352.931,1	240.293,2	185.091,7
Pertambangan Batubara dan Lignit	579,9	588,8	594,7
Pertambangan Bijih Logam	316.212,8	203.893,4	153.089,1
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	36.138,5	35.811,0	31.407,9
Industri Pengolahan	770.771,1	772.056,3	795.783,2
Pengadaan Listrik dan Gas	1.681,2	1.835,2	1.917,6
Ketenagalistrikan	1.568,5	1.725,7	1.806,2
Pengadaan Gas dan Produksi Es	112,7	109,5	111,4

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	2.066,3	2.285,1	2.527,5
Limbah dan Daur			
Konstruksi	613.616,4	560.440,8	607.571,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	371.513,1	368.719,4	373.027,6
Mobil dan Sepeda Motor			
Transportasi dan Pergudangan	347.747,0	346.019,7	384.144,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan	106.615,7	104.594,4	112.170,0
Minum			
Informasi dan Komunikasi	50.559,8	60.540,5	67.489,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	62.299,9	71.156,6	77.274,3
Real Estate	138.661,7	135.130,9	121.409,9
Jasa Perusahaan	772,5	688,1	693,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	330.627,1	322.693,2	345.209,3
dan Jaminan Sosial Wajib			
Jasa Pendidikan	289.516,7	305.350,6	317.275,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.984,6	144.476,7	154.471,9
Jasa lainnya	113.273,9	111.636,6	112.287,5
PDRB	5.110.220,5	4.944.306,2	5.087.479,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2022

Setalah mendapatkan gambaran kondisi perekonomian di Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarakan produk domestik regional bruto dari tahun 2019-2021. Kemudian, akan dilakukan analisis menggunakan *location quotient* (*lq*), *shift share*, dan tipologi klassen untuk melakukan analisis perkonomian dan penentuan sektor unggulan Kabupaten Katingan. *Location quotient* merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatan sektor basis atau *leading* sektor. Analisis *location quotient* merupakan dasar untuk mengetahui sektor kegiatan yang menstimulus pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan *location quotient* terbagi ke dalam tiga kategori yaitu:

- a) LQ > 1, yang mengartikan komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wialyah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.
- b) LQ = 1, yang mengartikan komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
- c) LQ < 1, yang mengartikan komoditas ini termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

Berdasarkan perhitungan location quotient di Kabupaten Katingan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 per sektor. Pertama sektor jasa lainnya yaitu organisasi bisnis, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini merupakan sektor yang memiliki perhitungan LQ terbesar pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,47. Hasil perhitungan ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 2,51 tetapi lebih tinggi jika dibangdingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,29. Kedua adalah sektor kontruksi dengan hasil perhitungan LQ pada tahun 2021 sebesar 1,46. Hasil perhitungan LQ untuk sektor kontruksi terus mengalami peningkatkan dari tahun 2019 sebesar 1,40 dan tahun 2020 sebesar 1,45. Ketiga adalah sektor jasa pendidikan, yang memiliki hasil perhitungan LQ pada tahun 2021 sebesar 1,38. Hasil perhitungan LQ untuk sektor ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,31 dan tahun 2020 sebesar 1,34. Keempat adalag sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, yang memiliki hasil perhitungan LQ pada tahun 2021 sebesar 1,34. Hasil perhitungan LQ pada sektor ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,22 dan tahun 2020 sebesar 1,27. Kelima adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki hasil perhitungan LQ pada tahun 2021 sebesar 1,31. Hasil ini mengalami penurunan jika dibangdingkan hasil perhitungan tahun 2019 sebesar 1,32 dan stagnan jika dibangdingkan hasil perhitungan tahun 2020 sebesar 1,31.

Berdasarkan perhitungan LQ Kabupaten Katingan per sub sektor. **Pertama** sub sektor kehutanan dan kayu yang memiliki hasil perhitungan LQ tertinggi sebesar 3,30 pada tahun 2021. Hasil ini terus mengalami penurunan jika dibangingkan tahun 2019 sebesar 4,12 dan tahun 2020 sebesar 3,46. **Kedua** sub sektor perikanan dengan hasil perhitungan LQ sebesar 2,79 pada tahun 2021. Hasil perhitungan ini mengalami peningkatan jika dibangingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 2,60. **Ketiga** sub sektor pertambangan biji logam dengan hasil perhitungan LQ pada tahun 2021 sebesar 1,22. Hasil ini terus mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 2,09 dan tahun 2020 sebesar 1,39. **Keempat** sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki hasil perhitungan LQ pada tahun 2021 sebesar 1,05. Hasil ini mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,08 dan tahun 2019 sebesar 1,07.

Merujuk pada perhitunan LQ sektor dan sub sektor produk domestik regional bruto di Kabupaten Katingan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat terindentfikasi sektor dan sub sektor yang menjadi stimulus penggerak ekonomi (basis dan *non* basis). Berikut ini merupakan hasil lengkap perhitungan LQ produk domestik regional bruto di Kabupaten Katingan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 per sektor dan sub sektor.

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Location Quotient Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor di Kabupaten Katingan

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	Rerata LQ	Ket
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	1,31	1,31	1,31	Basis
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan	1,07	1,08	1,05	1,06	Basis
Jasa Pertanian					
Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,12	3,46	3,30	3,63	Basis
Perikanan	2,60	2,60	2,79	2,66	Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,45	0,34	0,26	0,35	Non Basis
Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
Pertambangan Bijih Logam	2,09	1,39	1,22	1,57	Basis
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,92	0,94	0,82	0,89	Non Basis
Industri Pengolahan	0,98	1,00	1,00	1,00	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,36	0,37	0,37	Non Basis
Ketenagalistrikan	0,37	0,35	0,35	0,36	Non Basis
Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,74	0,76	0,77	0,76	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,51	0,54	0,56	0,54	Non Basis
Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	1,40	1,45	1,46	1,44	Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	0,61	0,62	0,62	0,61	Non Basis
Mobil dan Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	1,05	1,11	1,18	1,11	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan	1,22	1,27	1,34	1,28	Basis
Minum					
Informasi dan Komunikasi	0,82	0,90	0,86	0,86	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,39	0,41	0,42	0,41	Non Basis
Real Estate	1,39	1,38	1,21	1,33	Basis
Jasa Perusahaan	0,41	0,43	0,42	0,42	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1,11	1,03	1,14	1,09	Basis
dan Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	1,31	1,34	1,38	1,34	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,52	1,45	1,48	Basis
Jasa lainnya	2,29	2,51	2,47	2,42	Basis

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Setelah dilakukan perhitungan LQ dari tahun 2019 sampai tahun 2021 di atas. Bagian ini akan menampilkan rata-rata hasil perhitungan LQ pada setiap sektor dan sub sektor di Kabupaten Katingan. Berdasarkan hasil perhitungan rerata LQ didapatkan hasil berikut, **Pertama** sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dengan nilai rerata LQ sebesar 3,63. Hal ini menujukkan bahwa sektor ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi utama selama tiga terakhir. **Kedua** sub sektor perikanan dengan nilai rerata LQ sebesar 2,66. **Ketiga** sektor jasa lainnya dengan nilai rerata LQ sebesar 2,42. **Keempat** sub sektor pertambangan biji logam dengan nilai rerata LQ sebesar 1,57. **Kelima** sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai rerata LQ sebesar 1,48.

Tabel 5.4
Hasil Perhitungan Rerata *Location Quotient* Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor di Kabupaten Katingan Tahun 2019-2021

Lapangan Usaha	Rerata LQ	Ket
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	Basis
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,06	Basis
Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,63	Basis
Perikanan	2,66	Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,35	Non Basis
Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	Non Basis
Pertambangan Bijih Logam	1,57	Basis
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,89	Non Basis
Industri Pengolahan	1,00	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	Non Basis
Ketenagalistrikan	0,36	Non Basis
Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,76	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,54	Non Basis
Ulang		
Konstruksi	1,44	Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	0,61	Non Basis
Motor		
Transportasi dan Pergudangan	1,11	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	Basis
Informasi dan Komunikasi	0,86	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	Non Basis
Real Estate	1,33	Basis
Jasa Perusahaan	0,42	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,09	Basis
Wajib		
Jasa Pendidikan	1,34	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	Basis
Jasa lainnya	2,42	Basis

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Untuk dapat mengetaui kondisi perekonomian daerah secara lebih komprehensif, setelah melakukan analisis LQ untuk mengindentifikasi sektor dan sub sektor yang basis yang menstimulus pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Selanjutnya, akan dilakukan analisis dengan perhitungan *shif share*. Analisis *shift share* merupakan metode untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan. Metode *shift share* menekankan pada pengembangan ekonomi Kabupaten Katingan berdasarkan kondisi struktur perekonomian, pergeseran sektor-sektor unggulan pada dua kurun waktu, dan mengetahui posisi sektor perekonomian Kabupaten Katingan terhadap wilayah yang lebih luas yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

Metode *shift-share* diawali dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan, yang digambarkan dengan simbol *rn*. Untuk perbandingan wilayah

yang lebih luas (benchmark region) adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Rumus perhitungan shift share adalah sebagai berikut.

Dij = Nij + Mij + Cij

Keterangan:

Dij : Pertumbuhan ekonomi sektor atau sub sektor

Nij : Perubagan PDRB sektor atau sub sektor yang disebabkan oleh

pengaruh pertumbuhan wilayah acuan

Mij : Perubahan PDRB sektor atau sub sektor yang disebabkan oleh

pengaruh pertumbuhan ekonomi di wilayah acuan

Cij : Perubahan PDRB sektor atau sub sektor yang disebabkan oleh

keunggulan kompetitif sektor I di wilayah pengamatan

Berdasarkan hasil perhitungan *shif share* diperoleh 13 sektor dan sub sektor yang kompetitif. Dasar penetapan kompetitif dan bukan kompetitif adalah perhitungan nilai *Dij* positif. Berikut ini merupakan 10 sektor unggulan di Kabupaten Katingan:

- 1. Sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai *Dij* sebesar 20303,39;
- 2. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai Dij sebesar 14019,76;
- 3. Sektor informasi dan komunikasi dengan nilai Dij sebesar 9848,78;
- 4. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan nilai *Dij* sebesar 8171,83;
- 5. Sektor jasa pendidikan dengan nilai Dij sebesar 7204,71;
- 6. Sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai Dij sebesar 6669,16;
- 7. Sektor konstruksi dengan nilai Dij sebesar 1263,38;
- 8. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai *Dij* sebesar 9848,78;
- 9. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan nilai *Dij* sebesar 200,11;
- 10. Sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai Dij sebesar 127,10;

Berdasarkan hasil perhitungan *shift share* per sub sektor, diperoleh tiga sektor dengan nilai *Dij* positif. Berikut ini merupakan 3 sub sektor unggulan di Kabupaten Katingan:

- 1. Sub sektor perikanan dengan nilai Dij sebesar 16675,71;
- 2. Sub sektor ketenagalistrikan dengan nilai Dij sebesar 87,10;
- 3. Sub sektor pertambangan batubara dan lignit dengan nilai *Dij* sebesar 7,50.

Berikut ini merupakan hasil lengkap perhitungan *shift share* menurut sektor dan sub sektor lapangan usaha di Kabupaten Katingan.

Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Shift Share Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor di Kabupaten Katingan

	Sub Sektor di Kabupaten Katingan Shift Share (2020-2021)						
Lapangan Usaha	NiJ	Mij	Cij	Dij	SS	Keterangan	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14424,83	-25558,63	-21411,65	-32545,45	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9748,11	538,86	-18646,08	-8359,12	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Kehutanan dan Penebangan Kayu	1711,09	9367,96	-18649,76	-7570,70	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Perikanan	2965,63	6061,36	7648,72	16675,71	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Pertambangan dan Penggalian	1448,91	-16859,49	-49970,86	-65381,45	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Pertambangan Batubara dan Lignit	5,95	-25,19	26,74	7,50	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Pertambangan Bijih Logam	1162,08	-17989,74	-43358,17	-60185,83	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	280,88	-446,51	-1927,50	-2093,13	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Industri Pengolahan	8070,91	-10622,29	-3136,75	-5688,13	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Pengadaan Listrik dan Gas	19,63	180,69	-73,21	127,10	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Ketenagalistrikan	18,51	136,05	-67,44	87,12	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,12	-2,94	1,24	-0,59	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,81	80,43	92,87	200,11	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Konstruksi	6366,72	-8382,46	3279,12	1263,38	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

Lapangan Usaha	Shift Share (2020-2021)						
	NiJ	Mij	Cij	Dij	SS	Keterangan	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3735,22	-9993,86	-1812,26	-20500,35	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Transportasi dan Pergudangan	4084,16	-2185,76	18404,89	20303,29	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1167,48	-4581,80	3970,57	556,26	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Informasi dan Komunikasi	719,31	8576,39	553,08	9848,78	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Jasa Keuangan dan Asuransi	810,62	3445,96	2412,58	6669,16	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Real Estate	1109,03	617,56	-9610,93	-7884,34	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Jasa Perusahaan	6,92	-64,84	6,31	-51,61	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3587,37	3955,56	628,91	8171,83	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Jasa Pendidikan	3235,22	-341,43	4310,91	7204,71	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1604,68	15176,44	-2761,36	14019,76	Sektor Kompetitif	Nilai Dij positif (+) menandakan bahwa termasuk yang kompetitif	
Jasa lainnya	1119,81	-7061,55	2778,58	-3163,16	Bukan Sektor Kompetitif	Nilai Dij negatif (-) menandakan bahwa bukan termasuk sektor yang kompetitif	

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Setelah melakukan analisis dan perhitungan dengan menggunakan LQ dan *shift share* agar analisis kondisi perekonomian di Kabupaten Katingan menjadi semakin komprehensif berikut ini akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan tipologi klassen agar semakin memperkuat analisis perekonomian di Kabupaten Katingan. Analisis Klassen merupakan metode untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi. Tipologi klassen pada dasarnya membangi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan pendapatan per kapita pada sumbu horizontal. Tipologi Klassen membagi sektor dan sub sektor pendapatan daerah regional bruto ke dalam empat kategori sebagai berikut.

PDRB per kapita Laju Pertumbuhan	$\mathbf{Y_i} = \mathbf{Y_n}$	$Y_i < Y_n$
$\mathbf{r_i} = \mathbf{r_n}$	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
$r_i < r_n$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Gambar 4.1
Matriks Tipologi Klassen

Keterangan:

Ri : Laju pertumbuhan PDRB Daerah i
Rn : Laju pertumbuhan PDRB Provinsi
Yi : Pendapatan per kapita Daerah i
Yn : Pendapatan per kapita Provinsi

Berdasarkan hasil perhitungan tipologi klassen terdapat kuadran pertama adalah sektor maju dan tumbuh cepat, terdapat 5 sektor dan 1 sub sektor. Berikut ini merupakan sektor yang termasuk dalam kuadran pertama:

- 1. Sektor konstruksi;
- 2. Sektor transportasi dan pergudangan;
- 3. Sektor jasa pendidikan;
- 4. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; dan
- 5. Sektor jasa lainnya.

Untuk sub sektor yang terkategori dalam kuadran maju dan tumbuh cepat adalah sub sektor perikanan.

Tipologi selanjutnya adalah kuadran II, maju tapi tertekan, terdapat 4 sektor dan 3 sub sektor. Berikut ini merupakan sektor yang termasuk pada kuadran kedua:

- 1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- 2. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- 3. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
- 4. Sektor real estate.

Untuk sub sektor yang terkategori dalam kuadran maju tapi tertekan adalah sebagai berikut:

- 1. Sub sektor pertanian, peternakan, perburuhan, dan jasa pertanian;
- 2. Sub sektor kutanan dan penebangan kayu; dan

3. Sub sektor biji logam.

Tiplogi ketiga adalah sektor potensial, terdapat 4 sektor dan 2 sub sektor yang terklasifikasi pada tipologi ini. Berikut ini merupakan sektor yang termasuk dalam kuadran III.

- 1. Sektor jasa keuangan dan asuransi;
- 2. Sektor informasi dan komunikasi;
- 3. Sektor jasa perusahan; dan
- 4. Sektor pengadaan air, pegelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

Untuk sub sektor yang terkategori dalam kuadran potensial adalah sebagai berikut:

- 1. Sub sektor pertambangan batu bara dan lignit, dan
- 2. Sub sektor pengadaan gas dan produksi gas.

Tipologi keempat adalah sektor yang relatif tertinggal, terdapat 4 sektor dan 1 sub sektor. Sektor yang terklasifikasi pada kuadran ini adalah:

- 1. Sektor pertambangan dan penggalian;
- 2. Sektor industri pengolaan;
- 3. Sektor pengadaan listrik dan gas; dan
- 4. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Untuk sub sektor yang terkategori dalam kuadran relatif tertinggal adalah pertambangan dan penggalian lainnya. Berikut ini akan ditampilkan tipologi klassen sektor dan sub sektor di Kabupaten Katingan.

Tabel 4.6
Tipologi Klasen Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor di Kabupaten Katingan

1 0		· · · · · · · ·			0.
Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan (gi)	Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (g)	Kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Katingan (si)	Kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (s)	Tipologi Klassen
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,00	0,02	0,28	0,21	Sektor Maju tapi Tertekan
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-0,01	0,01	0,20	0,19	Sektor Maju tapi Tertekan
Kehutanan dan Penebangan Kayu	-0,03	0,09	0,03	0,01	Sektor Maju tapi Tertekan
Perikanan	0,06	0,03	0,05	0,02	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat
Pertambangan dan Penggalian	-0,27	-0,04	0,05	0,15	Sektor Relatif Tertinggal
Pertambangan Batubara dan Lignit	0,01	-0,03	0,00	0,10	Sektor Potensial
Pertambangan Bijih Logam	-0,30	-0,08	0,04	0,03	Sektor Maju tapi Tertekan
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-0,07	0,00	0,01	0,01	Sektor Relatif Tertinggal
Industri Pengolahan	0,02	0,02	0,15	0,16	Sektor Relatif Tertinggal
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,11	0,00	0,00	Sektor Relatif Tertinggal
Ketenagalistrikan	0,07	0,11	0,00	0,00	Sektor Relatif Tertinggal
Pengadaan Gas dan Produksi Es	-0,01	-0,02	0,00	0,00	Sektor Potensial
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,07	0,00	0,00	Sektor Potensial
Konstruksi	0,00	-0,01	0,12	0,08	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,00	0,01	0,07	0,12	Sektor Relatif Tertinggal
Transportasi dan Pergudangan	0,05	0,00	0,07	0,06	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan (gi)	Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (g)	Kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Katingan (si)	Kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (s)	Tipologi Klassen
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	-0,01	0,02	0,02	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat
Informasi dan Komunikasi	0,16	0,14	0,01	0,01	Sektor Potensial
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,08	0,01	0,03	Sektor Potensial
Real Estate	-0,06	0,01	0,03	0,02	Sektor Maju tapi Tertekan
Jasa Perusahaan	-0,05	-0,06	0,00	0,00	Sektor Potensial
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,02	0,02	0,07	0,06	Sektor Maju tapi Tertekan
Jasa Pendidikan	0,05	0,03	0,06	0,04	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,09	0,11	0,03	0,02	Sektor Maju tapi Tertekan
Jasa lainnya	0,00	-0,03	0,02	0,01	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

5.2. Analisis Produk Unggulan Daerah

Pada bagian ini akan ditampilkan dua sub pembahasan. *Pertama*, potensi dan permasalahan pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan. Permasalahan dan potensi ini diperoleh dari data primer hasi observasi dan survei. *Kedua*, penetapan produk unggulan daerah. Penetapan ini diperoleh dari hasil perhitungan *location quotient* (LQ), *shift share*, dan tipologi klassen. Selain itu, penetapan produk unggulan daerah juga dilakukan dengan berdasar data primer dari kuisioner.

5.2.1. Potensi dan Permasalahan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa potensi produk daerah yang dapat menjadi produk unggulan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, bahwa produk unggulan daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

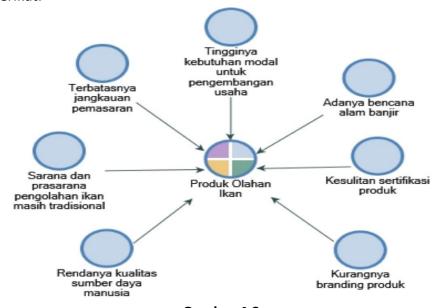
Merujuk pada data hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan terkait Penyusunan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Katingan, bahwa produk unggulan daerah Kabupaten Katingan adalah: 1) Barang kerajinan hasil rotan; 2) Rotan; 3) Beras; 4) Pengolahan Ikan; 5) Pisang; dan 6) Burung Walet. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan tahun 2019 bahwa produk unggulan daerah Kabupaten Katingan adalah: 1) Barang kerajinan dari rotan; 2) Rotan; 3) Beras; 4) Pengolahan Ikan; 5) Pisang; dan 6) Walet.

Berdasarkan hasil survei dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Katingan, terdapat beberapa temuan potensi dan pengembangan produk unggulan daerah. Berikut ini merupakan potensi dan permasalahan dari beberapa produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan.

1. Produk Olahan Ikan

Produk olahan ikan di Kabupaten Katingan sebagian besar bersumber dari hasil perikanan tangkap. Berdasarkan data potensi perikanan tangkap di Kabupaten Katingan tahun 2021. Bahwa, potensi perikanan tangkap di Kabupaten Katingan sebesar 4.761,91 ton per tahun. Potensi perikanan tangkap terbesar terdapat di Kecamatan Kamipang dengan 2.012,82 ton per tahun. Selanjutnya, Kecamatan Tasik Payawan dengan 983,86 ton per tahun. Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Katingan sebegain besar dijual dalam bentuk mentah dan diolah menjadi beberapa produk olahan ikan, seperti amplang, kerupuk, nuget, dan bakso ikan. Terdapat 12 kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) unit pengolahan ikan di Kabupaten Katingan.

Data diatas merupakan potensi dasar dalam upaya penumbuhan dan pengembangan produk olahan ikan di Kabupaten Katingan agar mampu berkontribusi luas pada sektor perekonomian daerah di Kabupaten Katingan. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.



Gambar 4.2
Permasalahan Produk Olahan Ikan

Sumber: Hasil Olah Data Primer dengan NvivoPlus12

Berdasarkan hasil analisis data primer menggunan Nvivo di atas, terdapat beberapa permasalahan pengembangan produk olahan ikan di Kabupaten Katingan.

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

Pertama, pada aspek ketersediaan bahan baku. Beberapa produk olahan ikan memanfaatkan hasil tangkapan ikan dari sungai. Namun, pada tahun ini terjadi bencana alam banjir yang mengakibatkan beberapa unit pengolahan ikan kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Untuk mengtasi permasalahan tersebut, terdapat upaya untuk melakukan pembudidayaan ikan. Akan tetapi, pembudidayaan ikan ini masih dilakukan di satu wilayah dan belum dilakukan secara massif.

Kedua, pada aspek permodalan terdapat permasalahan terkait tinggihnya kebutuhan modal untuk pengembangan usaha. Beberapa kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) unit pengolahan ikan merupakan industri skala rumah tangga dan industri kecil. Modal yang dibutuhkan untuk peningkatan skala industri pengolahan ikan cukup besar. Dalam upaya peningkatan kapasitas produksi harus dibarengi dengan pengadaan alat pengolahan ikan yang lebih modern, pengemasan yang lebih menarik, dan jangkauan pemasaran yang lebih luas. Untuk pemenuhan kebutuhan modal diperlukan akses terhadap permodalan. Namun, akses permodalan selama ini tersosialisasi dengan baik kepada kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) unit pengolahan ikan.

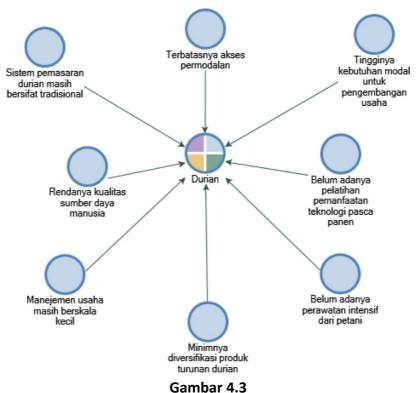
Ketiga, pada aspek sumber daya manusia terdapat permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu dasar penting untuk menjaga standar, kualitas, dan kontiniutas produksi. Rendanya kapasitas ini berpengaruh pada penguasaan skill dalam rantai produksi pengolaan ikan dari bahan mentah hingga produk jadi. Keempat, sarana dan prasarana pengolahan ikan masih tradisonal. Hal ini merupakan pengaruh dari tinggihnya kebutuhan modal dalam pengembangan produk pengolahan ikan di Kabupaten Katingan. Sebagai industri berskala rumah tangga dan kecil, alat-alat produksi yang digunakan masih bersifat sederhana. Kelima, terbatasnya jangkauan pemasaran. Hasil produk pengolaan ikan selama ini masih dipasarkan di daerah sekitar Kabupaten Katingan atau Kota PalangkaRaya. Pemasaran ini dilakukan melaului warung-warung kecil yang berada di dua wilayah tersebut. Terdapat satu produk hasil olahan ikan, amplang, yang sudah mampu menembus retail besar. Namun, saat ini terhenti akibat adanya kendala dalam perpanjangan sertifikasi produk.

Keenam, kesulitasn sertfikasi produk, kesulitasn sertifikasi produk ini bukan dalam proses pengajuan tetapi dalam perpanjangan sertifikasi produk. Sebagaian besar kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) unit pengolahan ikan meggunakan sertifikasi produk BPOM dan Halal. Akan tetapi, terdapat temuan di lapangan, bahwa terdapat kendala perpanjangan sertfikasi Halal yang dialami oleh salah satu unit usaha hasil pengolahan ikan. Padahal, sertfikasi ini merupakan syarat dasar untuk dapat mengakses *retail* besar. Ketujuh, kurangan *branding* produk. *Branding* produk merupakan hal penting dalam upaya memperluas jangkauan pemasaran, terlebih pada era digital saat ini. Beberapa kelompok usaha pengolah dan pemasaran hasil olahan ikan

masih menerapkan *branding* produk secara sederhana dan *packaging* yang masih tradisionl.

2. Durian

Durian di Kabpaten Katingan merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Katingan. Hal ini karena durian Kasongan sudah dikenal oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statisik Kabupaten Katingan tahun 2021, bahwa produksi durian di Kabupaten Katingan sebesar 6.961 kuintal. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan jika dibangdingkan dengan tahun 2020 sebesar 5.303 kuintal. Produksi buah durian tersebesar pada tahun 2021 berada di Kecamatan Pulau Malan dengan produksi sebesar 2.963 kuintal. Selanjutnya, Kecamatan Marikit dengan produksi sebesar 2.694 kuintal.



Permasalahan Durian

Sumber: Hasil Olah Data Primer dengan NvivoPlus12

Berdasarkan hasil analisis data primer menggunan Nvivo di atas, terdapat beberapa permasalahan pengembangan durian di Kabupaten Katingan. **Pertama**, pada aspek bahan baku bahwa belum adanya perawatan intensif dari petani. Merujuk hasil observasi dan survei di Kabupaten Katingan, bahwa sebagian besar petani durian memiliki pola tanam durian secara alami. Artinya, biji durian yang ditanam pada awal

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

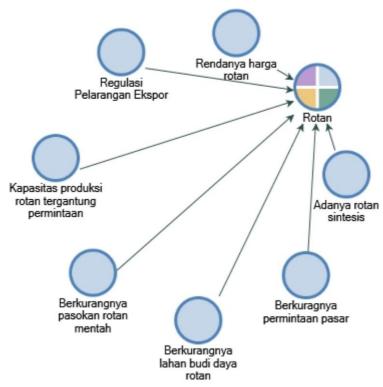
musim penghujan dibaiarkan tumbuh secara alami, tanpa dilakukan budidaya dan perawatan intensif. **Kedua**, menejemen usaha durian masih berskala kecil. Permasalahan ini berhubungan dengan kebutuhan modal dalam pengembangan usaha durian cukup besar, sehingga petani durian biasanya hanya melakukan menejemen usaha dalam sekala individu dan rumah tangga. **Ketiga,** Sistem pemasaran durian masih bersifat tradisional. Rantai pemasaran buah durian di Kabupaten Katingan adalah masih sederhana yaitu dari petani durian ke pedagang dan langsung ke kosumen. Petani durian memiliki dua mekanisme pemasaran yaitu menjual secara langsung buah durian yang masih di pohon pada tengkulak (pedangang buah durian) atau memasarkanhya sendiri melalui lapak di pinggir jalan raya. Selanjutnya, tengkulak (pedangang buah durian) juga memiliki dua makanisme pemasaran yaitu melalui penjualan langsung di lapak atau melalui *whatsaps* untuk penjulan di luar Kabupaten Katingan.

Keempat, tinggihnya kebutuhan modal untuk pengembangan usaha. Kebutuhan modal dalam pemgembangan skala usaha durian cukup besar dan ini tidak mampu dicukupi oleh petani durian. Hal ini karena hasil pemananen durian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani sehari-hari. Kelima, terbatasnya akses permodalan. Pada poin permasalahan keempat telah disebutkan bahwa tinggihnya kebutuhan modal untuk pengembamgan usaha durian. Salah satu upaya yang dapat ditempu dalam mengatasi persoalan tersebut adalah akses terhadap permodalan. Namun, akses terdapat permodalan ini juga masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi permodalan yang dilakukan sehingga menyebabkan petani tidak memiliki pengetahuan untuk mengakses permodalan. Padahal, aspek permodalan ini merupakan salah satu pondasi dasar dalam upaya scale up durian di Kabupaten Katingan.

Keenam, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini selain berhubungan dengan kapasitas dan pengetahuan juga *skill* yang dimiliki oleh petani durian. Namun, belum adanya pelatihan intensif baik pada aspek produksi durian dan pemasaran durian berakibat pada masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selaian itu, merujuk pada tingkat pendidikannya, sebagian besar petani durian di Kabupaten Katingan berpendidikan sekolah dasar. Ketujuh, belum adanya pelatihan pemanfaatan teknologi pasca panen. Sebagian besar petani durian di Kabupaten Katingan menjual durian dalam kondisi buah segar. Sehingga hasil panen durian belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah. Hal ini berkakibat pada pengetauan petani durian yang masih rendah dalam pemanfatan dan inovasi buah durian pasca panen. Kedelapan, Minimnya diversifikasi produk turunan durian. Sebagain besar hasil durian di Kabupaten Katingan di jual dalam bentuk buah segar. Pengembangan diversfikasi produk durian sebenernya sudah dilakukan tapi masih dalam skala rumah tangga seperti pengolaan durian menjadi tempoyak dan dodol.

3. Rotan

Rotan merupakan komoditas hasil hutan non-kayu. Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah penghasil rotan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari UPT Industri Rotan di Hampangen sampai bulan September 2022, bahwa produksi rotan asalan kering sebanyak 35 ton. Merujuk data Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan tahun 2019, bahwa prosentase rumah tangga yang memiliki mata pencaharian pada komoditas rotan hampir tersebar di seluruh wilayak kecamatan di Kabupaten Katingan. Prosentase terbesar berada di wilayah Kecamatan Katingan Hilir dengan prosesntase sebesar 95,9% dengan luasan kebun 3.338 Ha. Selanjutnya, Kecamatan Pulau Malan dengan prosesntase sebesar 85,6% dengan luasan kebun 2.962 Ha. Jenis Rotan yang banyak diusahakan masyarakat Katingan, meliputi Rotan Taman (Sega dan Irit), Rotan Marau/Manau dan Rotan Sabutan.



Gambar 4.4
Permasalahan Rotan

Sumber: Hasil Olah Data Primer dengan NvivoPlus12

Berdasarkan hasil analisis data primer menggunan Nvivo di atas, terdapat beberapa permasalahan pengembangan rotan di Kabupaten Katingan. **Pertama**, adanya regulasi pelarangan ekspor mentah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011, bahwa rotan mentah merupakan rotan yang masih

alami, tidak dirunti, tidak dicuci, dan tidak diasap/dibelerang. Rotan yang termasuk dalam kelompok Ex HS. 1401.20 meliputi: 1) Rotan mentah; 2) Rotan Asalan; 3) Rotan W/S, dan 4) Rotan setengah jadi. Keempat jenis rotan tersebut dilarangan ekspor. Untuk menindaklanjuti larangan tersebut, pengembangan produk rotan di Kabupaten Katingan dapat diarahkan pada penguatan industri pengolaan rotan. Hal ini agar rotan di Kabuapaten Katingan bisa diekspor dalam bentuk produk olahan rotan.

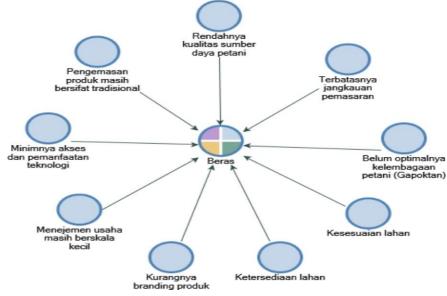
Kedua, pada aspek bahan baku adalah berkurangnya pasokan rotan mentah. Hal ini terjadi karena sebagian besar rotan tumbuh di hutan, saat ini terjadi deforestasi dan konversi lahan. Selanjutnya, menurunya semangat petani rotan. Hal ini disebabkan harga rotan yang fluktuatif sehingga petani rotan memilih untuk beralih ke mata pencaharian laiinya. Ketiga, berkurangnya ladang budi daya rotan. Merujuk hasil temuan di lapangan, saat ini rotan di Kabupaten Katingan tidak hanya berasal dari hutan tetapi juga sudah dibudidayakan. Namun, sebagian besar lahan budidaya rotan saat ini sudah dialaihkan pada komoditas lain yang memiliki kestabilan harga seperti kelapa sawit.

Keempat, rendahnya harga rotan. Hal ini merupakan masalah dasar yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan lainnya dalam pengembangan produk unggulan rotan di Kabupaten Katingan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pelarang ekspor rotan mentah. Sejatihnya, kebijakan ini memiliki tujuan yang baik agar rotan yang diekspor adalah rotan setengah jadi dan jadi. Namun, untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan berbagai skema kebijkan yang mendorong serta meningkatkan kapasitas petani dan pengrajin rotan agar mampu memproduksi rotan mentah dan memenuhi standarisasi permintaan pasar baik nasional maupun internasional. Kelima, kapasitas produksi rotan tergangtung pada permintaan pasar. Produksi rotan di Kabupaten Katingan selama ini didasarkan pada kapasitas permintaan pasar, sehingga jika permintaan turun maka produksi rotan juga menurun. Akibatanya, banyak petani dan pengrajin rotan yang beralih profesi. Keenam, berkurangnya permintaan pasar. Saat ini permintaan pasar rotan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan produksi rotan juga menurun. Penurunan permintaan pasar ini juga tidak terlepas dari adanya pengembangan rotan sintesis yang semakin meningkat. Ketujuh, adanya rotan sintesis. Berkembangnya produksi rotan sintesis ini menyebabkan terjadinya subsitusi produk terhadap rotan alami. Dengan harga yang lebih murah dan kualitas produk yang lebih baik rotan sintesis saat ini mulai mampu menggatikan rotan alami. Namun, hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk melakukan challenge agar tercipta berbagai inovasi rotan alami.

4. Beras

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Katingan bahwa pada tahun 2020 petani padi sawah di Kabupaten Katingan berhasil

memanen gabah kering sebanyak 100.560 ton. Dari 13 kecamatan di Kabupaten Katingan, terdapat tujuh kecamatan yang memiliki lahan pertanian sawah diantaranya:
1) Kecamatan Katingan Kuala; 2) Kecamatan Mendawai; 3) Kecamatan Tewang Sanggalang Garing; 4) Kecamatan Pulau Malan; 5) Kecamatan Katingan Tengah; 6) Kacamatan Senaman Mantikei; dan 7) Kecamatan Katingan Hulu.



Gambar 4.5
Permasalahan Beras

Sumber: Hasil Olah Data Primer dengan NvivoPlus12

Berdasarkan hasil analisis data primer menggunan Nvivo di atas, terdapat beberapa permasalahan pengembangan beras di Kabupaten Katingan. **Pertama**, ketersediaan lahan. Merujuk pada data Rencana Tata Ruang dan Kawasan Kabupaten Katingan, bahwa ketersediaan lahan untuk pertanian di Kabupaten Katingan adalah 6.834 hektare. Dari luas tersebut, sebanyak 4.360,23 hekatre yang akan difungsikan sebagai kawasan pertanian. **Kedua**, kesusuain lahan. Berdasarakan data keseusuailahan lahan, hanya terdapat dua wilayah kecamatan yang memiliki kesesuian lahan untuk sawah irigasi yaitu Kecamatan Pulau Malan dengan 53.360 Ha dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan 51.172 ha.

Ketiga, menejemen usaha masih berskala kecil. Secara kualitas produk beras Katingan memiliki mutu yang baik. Namun, pengembangan usaha yang masih berskala mikro menyebabkan beras Katingan belum memberikan kontribusi signifikan pada petani padi atau pengusaha penggilingan padi. Keempat, rendahnya kualitas sumber daya petani. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sumber daya petani di Kabupaten Katingan sebanyak 70% merupakan lulusan SMP. Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni merupakan dasar untuk *upscaling* dan *scale up* usaha beras di Kabupaten Katingan. Kelima, minimnya akses dan pemanfaatan teknologi. Sebagian besar petani

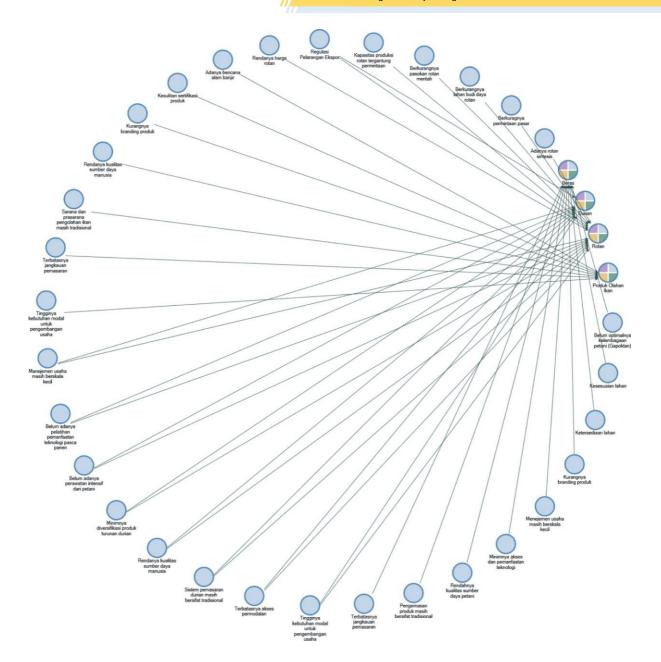
Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

padi di Kabupaten Katingan belum memanfaatkan teknolologi dalam pengolahan lahan maupun pemupukan. **Keenam**, belum optimalnya kelembagaan petani. Saat ini terdapat 51 kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Katingan, namun dari jumlah tersebut hanya 39 Poktan (74,47%) yang aktif. Persolan kelembagaan ini juga disebabkan karena minimnya sosialisasi terkiat pentingnya kelembagaan petani. Hal ini karena petani yang tergabung dalam kelompok tani memiliki akses lebih terhadap berbagai skema program pelatihan dan permodalan.

Ketujuh, kurangnya branding produk. Permasalahan ini berhubungan dengan skala usaha beras yang kecil di Kabupaten Katingan. Sebgaian besar petani pada di Kabupaten Katingan menjual beras setalah proses giling tanpa disertai merek. Hal ini mengakibatkan harga beras relatif rendah, padahal secara mutu produk memiliki kualitas yang tinggi. Kedepalan, terbatasnya jangkauan pemasaran. Pemasaran beras selama ini dilakukan di sekitar wilayah tempat produk padi atau ke Kota Banjarmasin. Belum adanya standar dan sertfikasi beras serta hilirisasi produk merupakan faktor kunci yang menyebabkan produk beras hanya dipasarkan di wilayah sekitarnya.

Pada bagian selanjutnya, akan diuraikan terkait permasalahan produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan. Setalah mengetahui permasalahan pada masing-masing produk unggulan daerah. Berikut ini merupakan masalah umum yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan berbagai produk tersebut.



Gambar 4.6
Permasalahan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Katingan
Sumber: Hasil Olah Data Primer dengan NvivoPlus12

Berdasarkan hasil pengolahan data primer dengan *software* Nvivo diatas, berikut ini merupakan permasalahan dan kendala dalam pengembangan produk menjadi produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan.

Produk Olahan Ikan

Permasalahan produk unggulan Produk Olahan Ikan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Adanya bencana alam banjir

- 2. Tingginya kebutuhan modal untuk pengembangan usaha
- 3. Rendanya kualitas sumber daya manusia
- 4. Sarana dan prasarana pengolahan ikan masih tradisional
- 5. Terbatasnya jangkauan pemasaran
- 6. Kesulitan sertifikasi produk
- 7. Kurangnya branding produk

Durian

Permasalahan produk unggulan Durian di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- 1. Belum adanya perawatan intensif dari petani
- 2. Manejemen usaha masih berskala kecil
- 3. Sistem pemasaran durian masih bersifat tradisional
- 4. Tingginya kebutuhan modal untuk pengembangan usaha
- 5. Terbatasnya akses permodalan
- 6. Rendanya kualitas sumber daya manusia
- 7. Belum adanya pelatihan pemanfaatan teknologi pasca panen
- 8. Minimnya diversifikasi produk turunan durian

Rotan

Permasalahan produk unggulan Rotan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- 1. Regulasi pelaragan ekspor rotan mentah
- 2. Berkurangnya pasokan rotan mentah
- 3. Berkurangnya lahan budi daya rotan
- 4. Rendanya harga rotan
- 5. Kapasitas produksi rotan tergantung permintaan
- 6. Berkuragnya permintaan pasar
- 7. Adanya rotan sintesis

Beras

Permasalahan produk unggulan beras di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- 1. Ketersediaan lahan
- 2. Kesesuaian lahan
- 3. Menejemen usaha masih berskala kecil
- 4. Rendahnya kualitas sumber daya petani
- 5. Minimnya akses dan pemanfaatan teknologi
- 6. Belum optimalnya kelembagaan petani (Gapoktan)
- 7. Pengemasan produk masih bersifat tradisional
- 8. Kurangnya branding produk
- 9. Terbatasnya jangkauan pemasaran

5.2.2. Penetapan Produk Unggulan Daerah

Penetapan produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan didasarkan pada analisis perekonomian *location quotient* (LQ), *shift share*, tipologi klassen, dan hasil kuisioner di lapangan. Berdasarakan gabungan hasil perhitungan *location quotient* (LQ), *shift share*, dan tipologi klassen didapatkan bahwa produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan terdapat pada **sektor pertanian**, **kehutanan**, **dan perikanan** dengan sub sektor: 1) **Perikanan**; 2) **Kehutanan dan penebangan kayu**; 3) **Pertanian**, **peternakan**, **perburuan**, **dan jasa**. Hasil penyandingan lengkap seluruh sektor dan sub sektor diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Hasil Perhitungan Rerata LQ, Shif Share, dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB

Kabupaten Katingan

	Kontribusi sektor terhadap		
Lapangan Usaha	Rerata LQ	Shif Share	PDRB Kabupaten Katingan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	-32545,45	0,28
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan			
Jasa Pertanian	1,06	-8359,12	0,20
Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,63	-7570,70	0,03
Perikanan	2,66	16675,71	0,05
Pertambangan dan Penggalian	0,35	-65381,45	0,05
Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	7,50	0,00
Pertambangan Bijih Logam	1,57	-60185,83	0,04
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,89	-2093,13	0,01
Industri Pengolahan	1,00	-5688,13	0,15
Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	127,10	0,00
Ketenagalistrikan	0,36	87,12	0,00
Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,76	-0,59	0,00
Konstruksi	0,54	200,11	0,00
Real Estate	1,44	1263,38	0,12
Jasa Pendidikan	0,61	-20500,35	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,11	20303,29	0,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,28	556,26	0,02
Transportasi dan Pergudangan	0,86	9848,78	0,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	6669,16	0,01
Informasi dan Komunikasi	1,33	-7884,34	0,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	-51,61	0,00
Jasa Perusahaan	1,09	8171,83	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	7204,71	0,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	14019,76	0,03
Jasa lainnya	2,42	-3163,16	0,02

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

Berdasarakan data hasil penyandian perhitungan *location quotient* (LQ), *shift share*, tipologi klassen tersebut menjadi landasan untuk mengindentifiasi masing-masing produk dari sub sektor tersebut. Identifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, pelaku usaha di Kabupaten Katingan, Bank Kalteng cabang Katingan, Universitas Muhammadiyah Katingan, dan Universitas Darwan Ali. Beberapa pihak tersebut menjadi representasi dari *stakeholder* yang akan terlibat dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan.

Kuisioner ini menggunakan beberapa variabel penetapan produk unggulan daerah. Varibel ini merujuk pada kriteria penetapan produk unggulan daerah pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahunn 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut kriteria penetapan produk unggulan daerah adalah: 1) Penyerapan tenaga kerja; 2) Sumbangan terhadap perekonomian; 3) Sektor basis ekonomi daerah; 4) Dapat diperbaruhi; 5) Sosial Budaya; 6) Ketersedian pasar; 7) Bahan baku; 8) Modal; 9) Sarana dan prasarana produksi; 10) teknlogi; 11) Menejemen usaha; dan 12) harga

Selanjutnya, agar penetapan produk unggulan daerah lebih komprehensif variabel tersebut dieloborasi bersama beberapa varibel penunjang lainnnya. Beberapa variabel penunjang ini merupakan kriteria yang ditetapkan dari pengalaman kegiatan konsultan sebelumnya bersama Kementerian Koperasi dan UMKM terkait "Penetapan Produk UMKM berorientasi Ekspor". Varibael tersebut selanjutnya dilakukan pembobotan dari skala 1-5. Namun, untuk varibael standar dan sertifikasi produk, terdapat pengeculian bobot menjadi 2 kali lipat, karena ini merupakan aspek penting dalam pengembangan produk unggulan daerah. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian diolah dan diratarata dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.8

Hasil Kuisioner Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Katingan

	Kriteria Produk Unggulan																	
No	Produk Unggulan	Bahan Baku	Potensi Lahan/Area Produksi/Pabrik untuk dikembangkan atau diperluasan	Tenga Kerja	Modal	Sarana dan Prasana Produks i	Intensitas Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi	Produksi Tersedia secara Kontinu	Kuantitas Produksi	Manejemen Usaha	Keunika n Lokal	Tidak Berdam pak Lingkun gan	Standiris asi/Sertif ikasi Produk	Keters edian Pasar	Ekspor ke Luar Negeri	Ekspor Ke Luar Daerah	Potensi untuk Diekspor ke Luar Negeri	Nilai Total
1	Durian	5	5	3	3	2	1	4	3	3	4	5	10	5	1	5	2	61
2	Rotan	5	5	4	3	4	2	5	5	3	5	4	10	5	0	4	0	64
	Produk Olahan																	
3	Rotan	5	4	3	4	4	5	5	5	4	3	3	4	3	1	3	2	58
4	Pisang	5	5	2	2	2	1	5	5	2	1	5	2	3	1	3	1	45
	Produk Olahan																	
5	Ikan	5	5	5	4	4	4	5	5	3	4	3	2	5	1	5	2	61
6	Beras	5	5	5	3	4	3	5	5	4	4	5	6	5	2	5	3	67
7	Walet	4	3	2	5	4	4	3	3	4	2	2	4	5	2	3	4	53
8	Sapi	4	3	2	4	2	2	3	3	3	2	2	2	4	1	3	1	41

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Berdasarkan pembobotan produk unggulan daerah dengan menggunkan kuisioner didapatkan nilai dari tertinggi ke terendah sebagai berikut:

- 1. Beras dengan nilai 67;
- 2. Rotan dengan nilai 64;
- 3. Produk Olahan Ikan dengan nilai 61;
- 4. Durian dengan nilai 61;
- 5. Produk Olahan Rotan dengan nilai 58;
- 6. Walet dengan nilai 53;
- 7. Pisang dengan nilai 45; dan
- 8. Sapi dengan nilai 41.

Merujuk pada hasil kuisioner diatas, terkait dengan produk unggulan beras terdapat beberapa varibel yang masih perlu dilakukan intervensi untuk optimalisasi produk unggulan daerah beras antara lain: 1) Aspek permodalan; dan 2) Potensi untuk diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, untuk produk unggulan rotan beberapa variabel yang perlu diintervensi adalah: 1) Modal; 2) Intensitas penggunaan teknologi dalam proses produksi; 3) Menejemen usaha; dan 4) Potensi untuk diekspor ke luar negeri.

Produk unggulan daerah produk olahan ikan perlu dilakukan intervensi pada: 1) Menejemen usaha; 2) Dampak terhadap lingkungan; dan 3) Potensi untuk diekspor ke luar negeri. Kemudian, untuk produk unggulan daerah durian, beberapa variabel yang perlu dintervensi adalah: 1) Tenaga kerja; 2) Modal; 3) Sarana dan prasarana produksi; 4) Intensitas penggunaan teknologi dalam proses produksi; dan 5) Potensi untuk diekspor ke luar negeri.

Beberapa produk unggulan daerah tersebut terdapat pada wilayah desa dan kecamtan berikut.

Tabel 4.9 Wilayah Produk Unggulan Daerah

No	Produk Unggulan	Desa	Kecamatan
		Buntut Bali	Pulau Manan
		Tumbang Sanamang	Katingan Hulu
1	Durian	Tewang Rangas	Tewang Sangalan Garin
		Hapalam	Tewang Sangalan Garin
		Tumbang Madurei	Marikit
		Petak Malai	Katingan Hulu
		Kiham Batam	Ratiligali Hulu
2	Rotan	Tewang Kadamba	Katingan Hilir
	KOLAII	Tumbang Liting	Katiligali Hilli
		Mandung Lama	Pulau Malan
		Kamanto	Sanaman Mantikei

No	Produk Unggulan	Desa	Kecamatan	
		Marikit	Tumbang Madurei	
3	Produk Olahan Rotan	Hampangean	Tasik Payawan	
3	Froduk Olahan Kotan	Luwuk Kiri	Tasik Fayawaii	
		Buntut Bali	Pulau Manan	
4	Pisang	Kuluk Bali	r ulau ivialiali	
-	risarig	Tumbang Tarusan	Tewang Sangalan Garin	
		Tewang Rangkang	Tewang Sangalan Garin	
		Baung Bango	Kamipan	
5	Produk Olahan Ikan	Tampelas	καιτιρατί	
		Sebangau Jaya	Katingan Kuala	
		Pegatan		
6	Beras	Jaya Makmur	Katingan Kuala	
		Bumi Subur		
		Tumbang Samba	Katingan Tengah	
7	Walet	Samba Danum	Katiligali Teligali	
'	vvalet	Kasongan Lama	Katingan Hilir	
		Jahanjan	Kamipan	
		Tampelas	Kamipan	
8	Sapi	Tewang Kadampa	Katingan Hilir	
		Tumbang Kataei	Bukit Raya	

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Beberapa wilayah diatas merupakan wilayah yang menghasilkan produk-produk tersebut dalam jumlah besar. Selanjutnya, agar lebih mudah dalam melakukan analisis secara spasial berikut ini merupakan peta produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan.

PETA PRODUK UNGGULAN KABUPATEN KATINGAN



Gambar 4.7
Peta Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Katingan
Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Bab

6

ANALISIS FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)

6.1. Stakeholder yang Terlibat pada Pelembagaan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan organisasi wadah yang berfungsi mengelola sumberdaya lokal melalui forum diskusi dan dialog dan bukan berfungsi sebagai pelaksana pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, PEL memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah maupun swasta dalam mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di daerah agar lebih optimal, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil kegiatan PEL adalah rekomendasi untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah, agar dapat direalisasikan oleh pihak-pihak yang mempunyai tupoksi dan tanggungjawab pada sektor terkait. Tugas PEL adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan UMKM produk unggulan daerah;
- 2. Pengembangan inkubator usaha;
- 3. Fasilititator sektor swasta dalam rangka membuat jaringan usaha dengan mitra lain;
- 4. Optimalisasi layanan pemerintah terhadap sektor swasta;
- 5. Penigkatan iklim kondusif bagi dunia usaha;
- 6. Penigkatan pola pelayanan perizinan satu pintu;
- 7. Peningkatan kinerja sektor pemerintah; dan
- 8. Peningakatan pemasaran potensi ekonomi daerah.

PEL menerapakan strategi pengembangan usaha dengan menggunakan pendekatan klaster. Klaster adalah sekumpulan usaha atas barang/jasa tertentu dalam suatu wilayah, yang membentuk kerja sama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif bersama berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pengembangan inkubator terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi antara lain:

- 1. Penentuan jenis produk unggulan daerah;
- 2. Dukungan iklim investasi;
- 3. Berbasis stratifikasi;
- Keterpaduan;
- 5. Partisipasi aktif; dan
- 6. Ketersediaan bank data.

PEL melibatkan kerja sama A-B-G (*Academic, Bussines*, dan *Government*) dalam melakukan peran dan fungsinya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Berikut ini hasil identifikasi *stakeholder* yang akan terlibat dalam PEL Kabupaten Katingan.

Tabel 6.1
Pihak, Kedudukan dalam Forum, dan Peran Pelembagaan Ekonomi Lokal
Kabupaten Katingan

	Kabupaten Katingan						
No	Pihak	Kedudukan Dalam Forum	Peran				
1	Bupati Katingan	Pengarah	 Memberikan arahan kepada Ketua PEL terkait dengan kebijakan PEL Kabupaten Katingan. Memberikan masukan sebagai bahan kebijakan dan program pengembangan ekonomi lokal berbasis produk unggulan daerah guna penguatan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan UMKM di Kabupaten Katingan. 				
2	Wakil Bupati Katingan	Pengarah	 Memberikan arahan kepada Ketua PEL terkait dengan kebijakan PEL Kabupaten Katingan. Memberikan masukan sebagai bahan kebijakan dan program pengembangan ekonomi lokal berbasis produk unggulan daerah guna penguatan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan UMKM di Kabupaten Katingan. 				
3	Sekretaris Daerah Katingan	Pengarah	 Memberikan arahan kepada Ketua PEL terkait dengan kebijakan PEL Kabupaten Katingan. Memberikan masukan sebagai bahan kebijakan dan program pengembangan ekonomi lokal berbasis produk unggulan daerah guna penguatan perekonomian masyarakat, termasuk pengembangan UMKM di Kabupaten Katingan. 				
4	Asisten Bagian Ekonomi	Pengarah	 Memberikan arahan kepada Ketua PEL terkait dengan kebijakan PEL Kabupaten Katingan. Memberikan masukan sebagai bahan kebijakan dan program pengembangan ekonomi lokal berbasis produk unggulan daerah guna penguatan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan UMKM di Kabupaten Katingan. 				
5	Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan	Ketua	 Koordinator forum PEL. Mengkoordinasikan PD dan instansi/lembaga terkait PEL Kabupaten Katingan. 				
6	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur Bappelitbang Kabupaten Katingan	Sekretaris	 Sekretaris forum PEL. Mengelola dan mengadministrasikan kegiatan koordinasi SKPD dan instansi/lembaga terkait PEL Kabupaten Katingan. 				
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Anggota	Memfasilitasi pengembangan UMKM pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.				

No	Pihak	Kedudukan Dalam Forum	Peran
	Menengah, dan Perdagangan		
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Memfasilitasi iklim investasi yang baik pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
9	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata	Anggota	Memfasilitasi pengembangan SDM pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
10	Dinas Perhubungan dan Perikanan	Anggota	Memfasilitasi pengembangan produk dan distribusi produk pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	Memfasilitasi promosi produk UMKM pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
12	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota	Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan skill SDM pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota	Memfasilitasi pengembangan produk pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
14	Dinas Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	Memfasilitasi pengembangan SDM dan kelembagaan ekonomi desa pada klaster/sentra sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
15	KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	 Menyusun peta jalan UMKM yang meliputi 4 tahapan yakni, UMKM potensial, UMKM success/link to market and finance, UMKM go digital, serta UMKM go export. Mengembangkan produk volatile food, local economic development serta Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) melalui aspek percepatan akses, pengembangan didorong dari akses financial, market, knowledge network, serta inovasi dan digitalisasi. Mendukung dari aspek infrastruktur dan kelembagaan dalam turut memberikan dampak bagi pembentukan ekosistem UMKM yang optimal, diantaranya melalui dukungan regulasi/kebijakan, keuangan inklusif, perlindungan konsumen, edukasi/literasi, model bisnis, monitoring, dan evaluasi serta penguatan kelembagaan dan sistem informasi. Menguatkan korporatisasi, penyempurnaan akurasi informasi dan data, optimalisasi koordinasi yang intensif antarkementerian/lembaga, peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta menciptakan ekosistem yang

No	Pihak	Kedudukan Dalam Forum	Peran
			mendukung, merupakan bagian dari faktor pendorong keberhasilan pengembangan UMKM di Indonesia yang akan senantiasa dibangun oleh Bank Indonesia.
16	Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	 Memfasilitasi relaksasi Kebijakan Non Performing Financing (NPF) Perusahaan Pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan piutang pembiayaan oleh industri Perusahaan Pembiayaan (PP) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengembangkan Asuransi Pertanian, untuk meningkatkan akses para petani ke sistem keuangan sehingga sektor pertanian regional dapat terus tumbuh dan berkembang. Membentuk Rating Agency Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mengurangi isu asymmetric information dalam pendanaan UMKM. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, yang difokuskan pada upaya mendorong LKM yang belum berbadan hukum agar segera mengajukan permohonan pengukuhan menjadi LKM sesuai UU LKM.
17	Bank Kalteng cabang Katingan	Anggota	 Menyediakan kredit bunga murah melalui Kredit UMKM Berkah untuk membiayai modal kerja dengan jenis pinjaman tetap dan sistem berkelompok. Menambahkan manfaat program Jamsostek pada program UMKM Berkah. Diharapkan dengan program dari BPJS Ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal dengan BPJamsostek tersebut, seluruh pelaku UMKM yang memanfaatkan program UMKM Berkah dari Bank Kalteng akan mendapatkan jaminan pada saat mengalami resiko Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
18	PT. Jamkrida Kalimantan Tengah	Anggota	Menyediakan kredit bunga murah untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
19	Universitas Muhammadiyah Katingan	Anggota	 Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis temuan riset dan mendorong inovasi. Menjadi UMKM sebagai partner pengembangan inkubasi bisnis dan inovasi berbasis hasil temuan riset. Pembinaan kemampuan industri kecil sehingga mendorong kemampuan industri kecil dalam mengakses modal.
20	Universitas Darwan Ali	Anggota	 Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis temuan riset dan mendorong inovasi. Menjadi UMKM sebagai partner pengembangan inkubasi bisnis dan inovasi berbasis hasil temuan riset. Pembinaan kemampuan industri kecil sehingga mendorong kemampuan industri kecil dalam mengakses modal.
21	Pelaku Usaha Produk Unggulan Daerah	Pokja	Melaksanakan forum PEL pada produk unggulan daerah dengan OPD/instansi/lembaga terkait di Kabupaten Katingan.

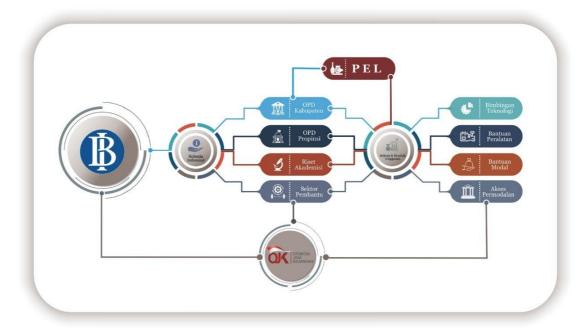
No	Pihak	Kedudukan Dalam Forum		Peran
			2.	Memberikan masukan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha produk unggulan daerah.

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Pada bagian berikut ini akan dipaparkan secara spesifik alur kerja Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam forum pengembangan ekonomi lokal. Bank Indonesia telah memiliki program pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM ini dilakukan berdasarkan potensi produk unggulan di suatu wilayah. Hal ini agar penumbuhan dan pengembangan UMKM sesuai kondisi dan berkelanjutan. Bank Indonesia memiliki empat tahapan pengembangan UMKM yaitu: 1) UMKM start; 2) UMKM sukses; 3) UMKM sukses digital; dan 4) UMKM go ekspor. Empat tahapan ini merupakan kesatuan proses dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Untuk mengetahui potensi produk unggulan daerah dan tahapan penumbuhan UMKM. Bank Indonesia melakukan belanja informasi. Hal ini merupakan langkah awal untuk memetakan potensi dan peluang pengembangan produk unggulan daerah. Bank Indonesia melalukan belanja informasi ini dengan melibatakan OPD baik di level Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Selain berkolaborasi, pelibatan OPD ini juga menjadi bagian belanja data potensi produk unggulan daerah. Setelah proses belanja informasi, Bank Indonesia akan melakukan riset KPJU dalam penentuan produk unggulan daerah yang akan dikembangkan. Hal ini penting agar tidak terjadi kontradiksi program antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan UMKM produk unggulan dilakukan melalui pelatihan dan pedampingan mulai dari aspek hulu hingga hilir, seperti: 1) Bimbingan teknologi; 2) Bantuan peralatan; 3) Bantuan modal; dan 4) Akses permodalan. Hal ini bertujuan agar UMKM produk unggulan yang didampingi dapat naik kelas. Bank Indonesia memiliki beberapa mitra stratgis dalam pengembangan produk unggulan daerah, diantaranya: 1) Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan; 2) Organisasi Pemerintah Daerah; dan 3) Akademisi.



Gambar 6.1
Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Forum Pengembangan
Ekonomi Lokal Kabupaten Katingan

6.2 Struktur Organisasi Pelembagaan Ekonomi Lokal

Struktur organisasi merupakan garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen penyusun organisasi, sehingga setiap sumber daya manusia pada organisasi tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Pelembagaan ekonomi lokal merupakan wadah atau forum yang berisi kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk berdiskusi dan berdialog terkait pengembangan ekonomi daerah. PEL ini berfungsi sebagai forum dialog bukan sebagai pelaksana pembangunan. Oleh karenanya, dalam upaya pembentukan pelembagaan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini merupakan struktur organiasai PEL Kabupaten Katingan.



Gambar 6.2
Struktur Organisasi PEL Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Merujuk pada struktur organiasai tersebut, terdapat 4 jenjang dalam struktur PEL, diantaranya:

- 1. Pengarah, yang terdiri dari:
 - a) Bupati Kabupaten Katingan;
 - b) Wakil Bupati Kabupaten Katingan;
 - c) Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan; dan
 - d) Asisten bagian ekonomi.
- 2. Ketua, yang diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan.
- 3. Sekretaris, yang diisi oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
- 4. Anggota, yang terdiri dari:
 - a) OPD Kabupaten Katingan;
 - b) KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c) Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah;

- d) Bank Kalteng cabang Katingan;
- e) PT Jamkrida Kalimantan Tengah;
- f) Pergurungan Tinggi di Kabupaten Katingan; dan
- g) Pelalu Usaha di Kabupaten Katingan

6.3 Rencana Aksi Forum Pelembagaan Ekonomi Lokal

Rencana aksi ini merupakan langkah awal dan panduan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka penumbuhan dan pengembangan pelembagaan ekonomi lokal (PEL) di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka penumbuhan dan pengembangan pelembagaan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak yeng terlibat dalam PEL. Berikut ini merupakan tahapan pembentukan PEL di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 6.3

Tahapan Penumbuhan dan Pengembangan PEL Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan gambar tahapan diatas dalam rangka penumbuhan dan pengembangan pelembagaan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) Pembentukan dan penguatan stakeholder PEL (3-6 bulan)
- 2) Analisis komoditi unggulan dan kawasan (3-6 bulan)
- 3) Penyusunan rencana dan anggaran (3-6 bulan)
- 4) Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus menerus hingga berhasil dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah (6-12 bulan)
- 5) Monitoring dan eveluasi secara berkala (12 bulan)

Dalam menjamin keberhasil penyelanggaran pelembagaan ekonomi lokal (PEL), terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi antara lain:

1) PEL merupakan proses *multi stakeholder*, sehingga dalam prosesnya harus melibatkan stakeholder kunci, terutama dari dunia usaha dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan PEL;

- 2) Adanya komitmen kuat dari kepala daerah terhadap PEL, yang diimpelemtasikan melalui adanya program dan kegiatan serta anggaran setiap tahunnya dalam jangka waktu yang lama;
- 3) Strong leadership, khususnya dari kepala daerah sangat diperlukan dalam membangun komitmen;
- 4) Pengutan komitmen pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan organisasi yang terlibat dalam PEL;
- 5) Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa PEL bukan "proyek pemerintah" melainkan kerja kolobarasi bersama masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator, sehingga diperlukan perubahan mindset dari masyarakat;
- 6) Perubahan *mindset* stakeholder darah, bahwa PEL merupakan kebutuhan daerah.

Merujuk pendapat Porter (2014) bahwa terdapat arah baru dalam pengembangan Pelembagaan Ekonomi Lokal (PEL). Beberapa arah baru tersebut diantaranya:

- 1) Berfokus pada daya saing;
- 2) Bebasis klaster;
- 3) Membangunan berdasarkan potensi dan kekuatan daerah;
- 4) Memngembangan strategi kewilayahan secata keseluruhan;
- 5) Menyusun prioritas dan strategi pembangunan;
- 6) Pembangunan berbasis data dan pengetahuan.

Dengen mempertimbangkan arah baru tersebut, berikut ini merupakan rencana aksi Pelembagaan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 6.2
Rencana Aksi PEL Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

No	Dио сио ма	Vaciatan	Tahap Pelaksanaan				Pihak Pelaksana	
NO	Program	Kegiatan	3 bulan	6 bulan	9 bulan	12 bulan	Pinak Pelaksana	
		Pertemuan awal seluruh stakaholder	*				Bapelitbangda	
1	Pembentukan dan Penguatan	Pemberiaan arahan awal terhadap PEL	*				Bupati dan Wakil Bupati	
Stakeholder	Sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya PEL	*				Stakeholder PEL		
		Identifikasi faktor dan kekuatan produk daerah	*				Bapelitbangda	
	Penyusunan	Penetapan produk unggulan daerah	*				Bapelitbangda	
2	Rencana dan Anggaran	Penyusunan pengembangan kawasan	*				Bapelitbangda	
		Penyusunan program dan kegiatan serta anggaran PEL	*				Bapelitbangda	
3	Pelaksanaan PEL	Fasilitasi iklim investasi yang baik terutama		*	*		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

No	Due que ve	Vocistor		Tahap Pe	elaksanaan		Dibak Dalaksana
No	Program	Kegiatan	3 bulan	6 bulan	9 bulan	12 bulan	Pihak Pelaksana
		UMKM berbasis produk					
		unggulan daerah					
		Fasilitasi pengembangan		*	*		Dinas Koperasi, Usaha
		UMKM					Kecil Menengah, dan
							Perdagangan
		Peningkatan dan		*	*		Dinas Kebudayaan,
		pengembangan kapasitas					Kepemudaan dan
		SDM pada sektor					Olahraga, serta
		unggulan daerah		_			Pariwisata
		Fasilitasi distribusi produk		*	*		Dinas Perhubungan
		unggulan daerah					dan Perikanan
		Fasilitasi pengembangan		*	*		Dinas Perhubungan dan Perikanan
		produk unggulan sentra perikanan dan produk					uan Penkanan
		olahan perikanan					
		Pelatihan peningkatan		No.	3/4		Dinas Perindustrian,
		skill pelaku usaha		*	*		Transmigrasi dan
		skiii pelaku usaria					Tenaga Kerja
		Fasilitasi pengembangan		*	*		Dinas Ketahanan
		produk unggulan sentra		4	~		Pangan dan Pertanian
		pertanian					Tangan dan Tertaman
		Fasilitasi peningkatan		*	*		Dinas Pemberdayaan
		SDM dan kapasitas		-,-			dan Pemberdayaan
		BUMDesa					Masyarakat Desa
		Fasilitasi promosi produk		*	*		Dinas Komunikasi,
		unggulan daerah					Informatika, Statistik
							dan Persandian
		Fasiitasi kredit usaha		*	*		PT. Jamkrida
		terhadap PEL					Kalimantan Tengah
		Penyediaan kredit bunga		*	*		Bank Kalterng cabang
		rendah					Katingan
		Memfasilitasi relaksasi		*	*		OJK
		Kebijakan Non Performing					
		Financing (NPF					
		Mengembangkan produk		*	*		Bank Indonesia
		volatile food, local					Kalimantan Tengah
		economic development					
		serta Wirausaha Bank					
		Indonesia (WUBI)					
		Memberikan		*	*		Universitas Darwan Ali
		rekomendasi kebijakan					dan Universitas
		pengembangan ekonomi					Muhammadiyah
		lokal berbasis temuan					Kasongan
		riset dan mendorong inovasi.					
		Memberikan masukan				*	Pelaku Usaha
		kendala dan				Α	i ciaku Osalia
		permasalahan					
4	Evaluasi dan	•					
.	Monitoring	•				*	Stakeholder PFI
		1 -				-14	
		selanjutnya					
4		pelaksanaan PEL Penyusunan rekomendasi pengembangan selanjutnya				*	Stakeholder PEL

MASTERPLAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

7.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan berbagai strategi. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal strengths dan weaknesses serta lingkungan eksternal oportunities dan threats yang dihadapi perusahaan/institusi/lembaga. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategik.

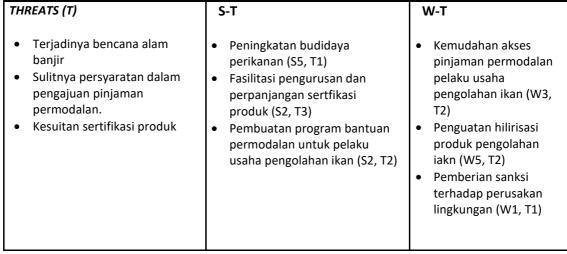
Dengan analisis SWOT ini maka akan teridentifikasi faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Agar lebih konprehensif dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, analisis SWOT ini akan dilakukan per produk unggulan daerah. Produk unggulan daerah ini berdasarkan perhitungan *location quontient* (LQ), *shift share*, dan tipologi Klassen sebagaimana telah diuruaikan pada bab IV laporan ini. Dari identifikasi tersebut, maka dapat ditentukan strategi yang tepat dalam pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Katingan berdasarkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut.

Tabel 7.1

Diagram Matrik SWOT Pengembangan Ekonomi Lokal Produk Unggulan Daerah
Olahan Ikan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Internal Factor Evaluation (IFE)	STRENGHTS (S)	WEAKNESSES (W)
	 Sub sektor perikanan memiliki nilai LQ, shift share, dan Klassen bernilai positif Adanya komitmen dari berbagai stakeholder dalam pengembangan produk olahan ikan Adanya spirit kuat dari pelaku usaha untuk meningkatkan 	 Belum optimalnya kerja-kerja lintas stakeholder dalam pemgembangan industri pengolahan ikan Kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku usaha

Eksternal Factor Evaluation (EFE)	dan mengembangkan usaha pengolahan ikan • Adanya pengembangan budidaya perikanan yang telah dilakukan	pengolahan ikan yang masih rendah • Menejemen pengolahan ikan masih kecil dan berskala rumah tangga • Branding produk pengolahan ikan masih bersifat tradisional • Jangkauan pemasaran produk olahan ikan masih terbatas.
 Adanya perkembangan teknologi dan otomatisasi yang dapat menunjang produksi produk olahan ikan Semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran produk. Adanya berbagai mekanisme permodalan berbunga rendah yang dapat diakses oleh pelaku usaha pengolahan ikan Adanya berbagai mekanisme pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan yang tersedia di platform digital. Munculnya kreatifitas dan inovasi pelaku usaha. 	 S-O Optimalisasi teknologi informasi dalam pemasaran digital produk olahan ikan (S1, O2) Pelatihan peningkatan kapasitas dan kabapilitas pelaku usaha pengolahan ikan (S2, O4) Fasilitisasi kemudahaan akses permodalan bagi pelaku usaha pengolahan ikan (S3, O3) Penguatan fasilitasi kreatifitas dan inovasi pelaku usaha pengolahan ikan (S3, O5) Peningkatan kapasitas produksi olahan ikan dengan pemanfaatan teknologi (S3, O1) 	Pembuatan database produk olahan ikan (W1, O2) Peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan dalam perluasaan jaringan pemasaran berbasis teknologi informasi (W2, O2) Peningkatan branding produk olahan ikan dengan pemanfaatan teknologi informasi (W4, O2) Fasilitasi peningkatan kelas usaha UMKM pengolahan ikan (W3, O4) Up saclling SDM pelaku usaha pengolahan ikan melalui pelatihan terintegrasi dari hulu ke hilir (W2, O4)



Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Produk unggulan daerah selanjutnya adalah durian. Berikut ini merupakan hasil analisis SWOT dalam upaya pengembangan daya saing produk unggulan daerah Durian.

Tabel 7.2

Diagram Matrik SWOT Pengembangan Ekonomi Lokal Produk Unggulan Daerah

Durian di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

ODDODTUNITIES (O)		Lw 0
OPPORTUNITIES (O)	S-O	W-O
 Semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran produk. Branding produk Durian Katingan sudah dikenal luas Adanya berbagai mekanisme permodalan berbunga rendah yang dapat diakses oleh petani durian Adanya berbagai mekanisme pelatihan peningkatan kapasitas petani durian. 	 Pelatihan peningkatan kapasitas petani durian (S1, O4) Peningkatan program kemitraan permodalan untuk petani durian (S2, O3) Peningkatan pemasaran dengan pemanfaatan platform pemasaran digital (S1, S2, O1, O2) 	 Pelatihan pasca panen terhadap petani durian (W2, O5) Diversifikasi produk turunan durian (W5, O2, O1, O5) Peningkatan kelas petani durian (W4, O3)
THREATS (T)	S-T	W-T
 Serangan hama Adanya pesaing dari daerah lain Iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi Sulitnya persyaratan dalam pengajuan pinjaman permodalan. Biaya perawatan yang semakin tinggi 	 Peningkatan budidaya durian secara integratif (S1, T1, T3) Program pupuk bersusidi (S1, T5) 	Kemudahan akses permodalan petani durian (W4, T4)

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Produk unggulan daerah selanjutnya adalah rotan. Berikut ini merupakan hasil analisis SWOT dalam upaya pengembangan daya saing produk unggulan daerah rotan.

Tabel76.3

Diagram Matrik SWOT Pengembangan Ekonomi Lokal Produk Unggulan Daerah
Rotan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

	STRENGHTS (S)	WEAKNESSES (W)
Internal Factor Evaluation (IFE) Eksternal Factor Evaluation (EFE)	 Sub sektor hasil kehutanan memiliki nilai LQ, shift share, dan Klassen bernilai positif Adanya nilai sosial-budaya yang kuat rotan di Kabupaten Katingan Adanya sertfikasi produk Adanya pengembangan budidaya rotan 	 Rendahnya kualitas SDM Sistem pemasaran berdasarkan pesanan Berkurangnya lahan budi daya rotan Sarana dan prasarana pengolahan rotan masih tradisional
OPPORTUNITIES (O)	S-O	W-O
 Semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran produk. Perkembangan teknologi produksi rotan Adanya berbagai mekanisme permodalan berbunga rendah yang dapat diakses oleh pelaku usaha rotan Adanya berbagai mekanisme pelakin usaha rotan Adanya berbagai mekanisme pelatihan peningkatan kapasitas palaku usaha rotan 	 Peningkatan branding dan narasi produk rotan (S1, S2, O1) Peningkatan kualitas produksi rotan berbasis pemanfaatan teknologi (S1, S3, O2) Pelatihan pengembangan budidaya rotan (S4, O4) 	 Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha rotan (W1, O4) Pemasaran digital (W2, O1) Peningkatan sarana dan prasarana produksi rotan (W4, O2, O3)

THREATS (T)	S-T	W-T
 Adanya rotan sintesis Adanya pesaing dari daerah lain Biaya produksi yang semakin tinggi 	 Peningkatan budidya rotan secara berkualitas (S4, T1, T2) Bantuan biaya produksi rotan (S1, T3) 	 Peingkatan sarana dan prasarana produksi rotan (W4, T1, T2) Perluasan jangkauan pemasaran (W2, T1, T2)

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

Produk unggulan daerah selanjutnya adalah beras. Berikut ini merupakan hasil analisis SWOT dalam upaya pengembangan daya saing produk unggulan daerah beras.

Tabel 7.4

Diagram Matrik SWOT Pengembangan Ekonomi Lokal Produk Unggulan Daerah

Beras di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Internal Factor	STRENGHTS (S)	WEAKNESSES (W)
Evaluation (IFE)		
Eksternal Factor Evaluation (EFE)	 Sub sektor pertanian memiliki nilai LQ, shift share, dan Klassen bernilai positif Adanya komitmen pemerintah dalam pengembangan produk unggulan beras 	 Kesuaian lahan Ketersediaan lahan Rendahnya kualitas SDM Minimnya akses dan pemanfaatan teknologi Sistem pemasaran masih tradisional Kurangan branding produk
OPPORTUNITIES (O)	S-O	W-O
 Semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran produk. Adanya berbagai mekanisme permodalan berbunga rendah yang dapat diakses oleh petani padi 	 Peningkatan pelaihan kapasitas petani padi (S2, O3) Fasilitasi bantuan permodalan (S1, S2, O2) Literasi pemasaran dan branding digital (S1, O1) 	 Pembuatan database kesusaian lahan padi (W1, O1) Up scaling kemampuan petani padi (W3, O3) Perluasan kemitraan dan pemasaran

 Adanya berbagai mekanisme pelatihan peningkatan kapasitas petani padi. 		berbasis teknologi informasi (W3, W4, O1)
 Terjadinya bencana alam banjir Adanya pesaing dari daerah lain Iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi Sulitnya persyaratan dalam pengajuan pinjaman permodalan. 	 S-T Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi padi (S1, S2, T2) Penyediaan roadmap pertanian padi dan perubahan iklim (S1, S2, O1, O3) 	 W-T Perekayasaan lahan (W1, T3) Peningkatan brading digital (W5, W6, T2)

Sumber: Olahan Konsultan, 2022

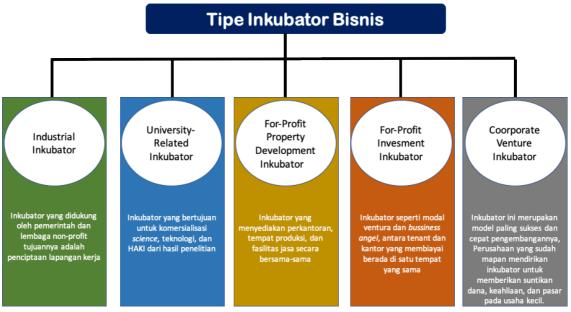
7.2. Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, bahwa perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dapat dilakukan melalui: 1) Inkubator; 2) Klaster; 3) *one village on product* (OVOP); dan 4) Kompetensi Inti. Dengan mempertimbangkan kondisi di Kabupaten Katingan, perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui model inkubator.

Menurut *USA Incubation National Business Incubation Associatan* mengartikan model pengembangan inkubator merupakan alat pengembangan ekonomi yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan wirausaha melalui penyiapan sumber daya dan pendukung usaha. Tujuan utama inkubator bisnis adalah untuk mengahasilkan pelaku usaha yang sukses dan mandiri. Selanjutnya, merujuk pada *UK Center for Strategy and Evalution Services*, bahwa inkubator bisnis adalah organisasi untuk mempercepat dan mensistematisasi proses pencipataan perusahaan yang mandiri dengan berbagai dukungan komprehensif dan terintegrasi, termasuk: ruang inkubator, layanan dukungan bisnis, serta ruang pengelompokkan dan jaringan.

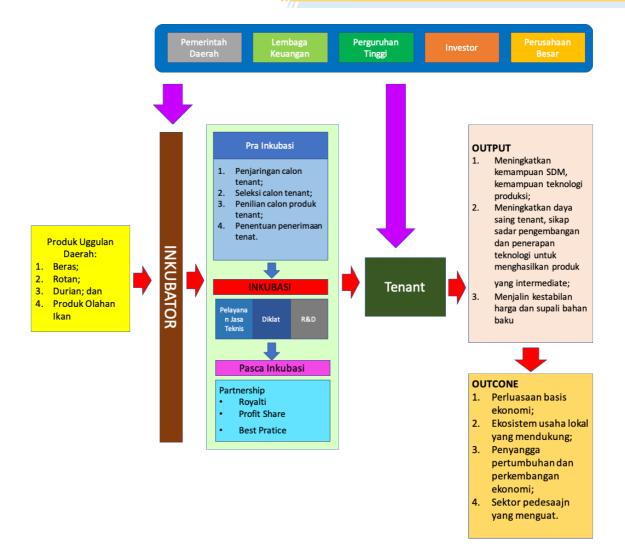
Merujuk keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 813/Kep/M.KUKM/VIII/2022 bahwa inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Inkubator bisnis merupakan lembaga yang bergerak dalam

bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.



Gambar 7.1
Tipe Inkubator Bisnis

Berdasarkan tipe inkubator bisnis di atas, perencanaan pengembangan produk unggulan di Kabupaten Katingan diarahkan pada model perencanaan pengembangan corporate venture inkubator. Hal ini didasarkan pada kondisi pelaku usaha produk unggulan yang belum memiliki kualitas setara. Model ini dianggap tepat karena akan memunculkan pilot project pengembangan pelaku usaha secara mandiri yang nanti akan menajdi inkubator bagi pelaku usaha lainnya. Berikut ini merupakan model pengembangan produk unggulan agrobisnis di Kabupaten Katingan.



Gambar 7.2 Model Perencanaan Inkubator

Pengembangan produk unggulan dengan model inkubator menekankan pada peran dan kerjasama stakeholder terkait untuk menumbuhkan dan memfasilitasi pelaku usaha produk unggulan dapat menuju kemandirian dan berkelanjutan. Model pengembangan inkubator dimulai dengan penetapan tenant. Tenant merupakan pelaku usaha yang akan difasilitasi dengan berbagai skema pengembangan usaha. Setelah penetapan tenant, inkubasi dilakukan secara intensif dan bertahap dalam jangka waktu selama satu tahun. Pasca inkubasi, pelaku usaha tersebut diharapkan menjadi *best practice* dan mengembangkan *corporate venture* untuk pelaku usaha produk unggulan lainnya yang masih beskala kecil dan dalam tahap pertumbuhan. Hal ini merupakan upya untuk mencapai ekosistem pengembangan produk unggulan daerah yang mampu menopang struktur perekonomian daerah dan peningkatan daya saing dalam era revolusi industri 4.0.

7.3. Strategi Pemgembangan Ekonomi Lokal

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan diatas, terdapat beberapa rumusan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Agar lebih komprehensif dalam pengembangan ekonomi lokal, perumusan strategi ini dilakukan per produk unggulan daerah, sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya. Selanjutnya, beberapa produk daerah tersebut akan disusun strateginya berdasarkan analisis Nvivo pada bab sebelumnya dan SWOT di atas. Berikut ini merupakan strategi pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

a) Produk Olahan Ikan

Dalam upaya pengembangan produk olahan ikan agar memiliki daya saing dan mampu berkontribusi dalam perekonomian daerah. Berdasarkan analisis Nvivo permasalahan dan analisis SWOT, berikut ini merupakan strategi yang dapat dilakukan.



Gambar 7.3 Strategi Pengembangan Produk Olahan Ikan

Berdasarkan strategi di atas, terdapat beberapa kegiatan turunan yang dapat dilakukan pada masing-masing strategi. Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-masing pilar strategi.

1. Strategi Optimalisasi Potensi dan Peningkatan Produksi Perikanan, diimplementasikan melalui kegiatan:

- a) Identifikasi potensi dan lokasi potensial perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b) Pembuatan database nelayan, pelaku pengolahan ikan, dan produk olahan ikan secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi;
- c) Memberikan kemudahan akses permodalan kepada nelayan dengan melibatkan pihak perbankan;
- d) Mengoptimalkan pemberian bantuan permodalan bagi nelayan secara berkelanjutan dan tepat sasaran;
- e) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang handal berbasis teknologi dan otomatisasi;
- f) Pengembangan sistem penyimpanan dan pengawetan hasil tangkapan seperti cold storage;
- g) Memberikan pendampingan dan pelatihan secara terintegrasi dan berkelanjutan kepada kelompok nelayan.
- h) Mengembangkan tempat pelelangan hasil tangkapan dari nelayan
- i) Memfasilitasi pendirian koperasi nelayan; dan
- j) Penanganan banjir di wilayah yang potensial budidaya dan pengolahan produk olahan perikanan melalui sosialisasi pencegahan kerusakan hutan, kerjasama antar-pihak, dan melakukan penindakan tegas kepada pihak perusak lingkungan.

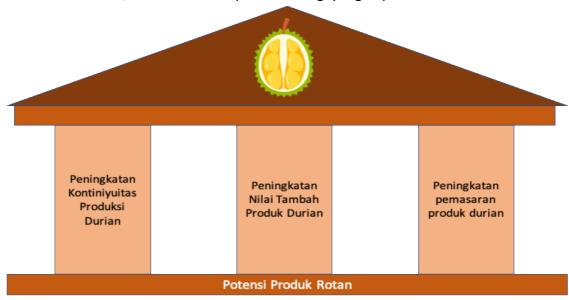
2. **Stategi Peningkatan Pengolahan Produk Olahan Ikan**, diimplementasikan melalui kegiatan:

- a) Identifikasi kebutuhan sarana produksi pengolahan ikan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha;
- Optimalisasi pemberian bantuan sarana produksi dan akses permodalan kepada pelaku usaha pengolahan ikan secara terintegrasi dan tepat sasaran;
- c) Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pengolahan ikan melalui pelatihan terintegratif dari hulu ke hilir, pengurusan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk ekspor, *packaging*, standarisasi produk, dan diversifikasi produk olahan ikan.
- d) Fasilitasi pengurusan dan perpanjangan sertifikasi produk olahan ikan, diantaranya sertifikat halal dan BPOM
- e) Peningkatan peran dan keterlibatan stakeholders terkait dalam pengembangan produk olahan ikan, diantaranya perguruan tinggi, Lembaga perbankan, instansi tekait, NGO, dll

- f) Mendorong usaha terkait perikanan, diantaranya tempat wisata dan restoran
- 3. **Strategi peningkatan pemasaran produk olahan ikan**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Mengembangkan jejaring pemasaran produk olahan ikan di luar daerah Kabupaten Katingan
 - b) Membangun jejaring bisnis antara nelayan dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD
 - c) Peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan pemasaran produk olahan ikan berbasis teknologi informasi
 - d) Peningkatan *branding* produk olahan ikan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi
 - e) Pendampingan dan pelatihan secara intensif kepada pelaku usaha olahan ikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, serta platform digital
 - f) Meningkatkan keterlibatan berbagai pihak untuk mempromosikan produk olahan ikan Kabupaten Katingan.

b) Durian

Dalam upaya pengembangan produk durian agar memiliki daya saing dan mampu berkontribusi dalam perekonomian daerah. Berdasarkan analisis Nvivo permasalahan dan analisis SWOT, berikut ini merupakan strategi yang dapat dilakukan.



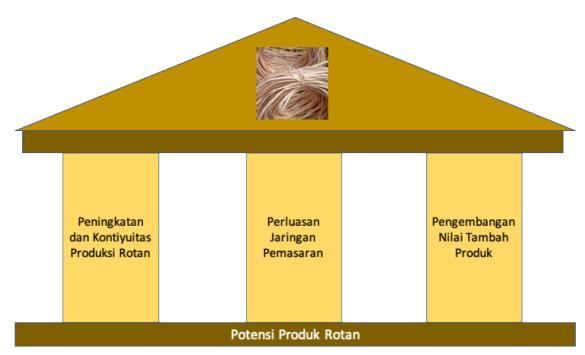
Gambar 7.4
Strategi Pengembangan Produk Durian

- 1. **Strategi Peningkatan Kontinyuitas Produksi Durian**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Penyusunan peta potensi, profil dan database perkebunan durian, diantaranya memuat profil petani, luas lahan, jenis durian, dan jumlah pohon durian, serta hasil panen dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b) Pengembangan varietas bibit unggul berciri khas Katingan melalui kerjasama dengan pihak terkait;
 - c) Pendampingan dan pelatihan kepada petani durian (*up scaling*) dalam pengelolaan dan perawatan perkebunan durian secara intenfif dan berkelanjutan;
 - d) Optimalisasi pemberian bantuan bibit dan pupuk subsidi secara integratif dan tepat sasaran
 - e) Memberikan kemudahan akses permodalan dan bantuan permodalan kepada petani durian secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
 - f) Pengembangan perkebunan durian secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
- 2. **Stategi Peningkatan Nilai Tambah produk Durian**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Melakukan kajian pengembangan produk turunan durian, beserta kebutuhan sarana produksi yang dibutuhkan.
 - b) Optimalisasi pemberian bantuan sarana produksi dan akses permodalan kepada pelaku usaha pengolahan produk durian secara terintegrasi dan tepat sasaran.
 - c) Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pengolahan produk turunan durian melalui pelatihan terintegratif dari hulu ke hilir, pengurusan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk ekspor, *packaging*, standarisasi produk, dan diversifikasi produk olahan durian.
 - d) Fasilitasi pengurusan dan perpanjangan sertifikasi produk olahan durian, diantaranya sertifikat halal dan BPOM
 - e) Peningkatan peran dan keterlibatan stakeholders terkait dalam pengembangan produk olahan durian, diantaranya perguruan tinggi, Lembaga perbankan, instansi tekait, NGO, dll
 - f) Pengembangan kawasan perkebunan durian menjadi objek wisata edukasi dan minat khusus.
- 3. **Strategi peningkatan pemasaran produk Durian**, diimplementasikan melalui kegiatan:

- a) Mengembangkan jejaring pemasaran produk durian di luar daerah Kabupaten Katingan
- b) Peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan pemasaran produk durian berbasis teknologi informasi
- c) Peningkatan *branding* produk durian dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi
- d) Pendampingan dan pelatihan secara intensif kepada pelaku usaha durian melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, serta platform digital
- e) Meningkatkan keterlibatan berbagai pihak untuk mempromosikan produk durian Kabupaten Katingan.

c) Rotan dan Pengolahan Produk Rotan

Dalam upaya pengembangan produk rotan agar memiliki daya saing dan mampu berkontribusi dalam perekonomian daerah. Berdasarkan analisis Nvivo permasalahan dan analisis SWOT, berikut ini merupakan strategi yang dapat dilakukan.



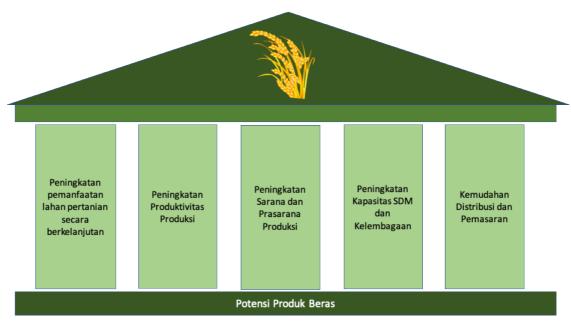
Gambar 7.5
Strategi Pengembangan Rotan

Berdasarkan strategi di atas, terdapat beberapa kegiatan turunan yang dapat dilakukan pada masing-masing strategi. Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-masing pilar strategi.

- 1. **Strategi peningkatan dan kontinyituas produksi rotan**, diimplemetasikan melalui kegiatan:
 - a) Penyusunan peta potensi, profil dan database perkebunan rotan, diantaranya memuat profil petani, luas lahan, dan hasil panen dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - b) Pendampingan dan pelatihan kepada petani rotan (*up scaling*) dalam pengelolaan dan perawatan perkebunan rotan secara intenfif dan berkelanjutan;
 - c) Memberikan kemudahan akses permodalan dan bantuan permodalan kepada petani rotan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
 - d) Meningkatkan kemudahan aksesibilitas ke perkebunan rotan sehingga dapat menurunkan biaya produksi rotan;
 - e) Menerapkan teknik agroforestry;
 - f) Pengembangan perkebunan rotan secara berkenjutan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan melalui pencegahan *deforestasi,* degradasi, dan konversi lahan.
- 2. **Stategi perluasan jaringan pemasaran**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Melakukan kajian distribusi dan pasar potensial produk rotan
 - b) Meningkatkan jejaring pemasaran agar meningkatkan *demand* produk rotan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta dapat meningkatkan harga pasar produk rotan.
 - c) Menciptakan pasar rotan berdasarkan tiap ragam jenis dan kualitas rotan baik untuk permintaaan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
 - d) Meningkatkan *branding* melalui narasi budaya dan kampanye cinta rotan. Bila kita tidak membeli rotan maka rotan akan punah;
 - e) Mewajibkan dan atau mendorong penggunaan rotan di kantor pemerintah, pemda, BUMN/D, hotel, restoran, café, bandara, dll
- 3. **Strategi pengembangan nilai tambah produk**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pengusaha mebel/furniture sehingga menjadi perusahaan furniture kelas dunia;
 - b) Menyiapkan litbang (diferensiasi) produk kreatif baru sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas untuk jaringan pemasaran Rotan di Indonesia;

d) Beras

Dalam upaya pengembangan produk beras agar memiliki daya saing dan mampu berkontribusi dalam perekonomian daerah. Berdasarkan analisis Nvivo permasalahan dan analisis SWOT, berikut ini merupakan strategi yang dapat dilakukan.



Gambar 7.6
Strategi Pengembangan Beras

Berdasarkan strategi di atas, terdapat beberapa kegiatan turunan yang dapat dilakukan pada masing-masing strategi. Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-masing pilar strategi.

1. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pertanian secara Berkelanjutan

- a) Pengaturan pemanfaatan lahan pertanian dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan
- b) Optimalisasi ketaatan pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya

2. Strategi Peningkatan Produktifitas Produksi

- a) Peningkatan riset pengembangan varietas bibit unggul dan kesesuaian lahan pertanian
- b) Program pengaturan pola tanam produk petani antara beras putih, beras merah, dan dedak;
- c) Pengembangan pada subsistem hilir ini terkait dengan skema *Paddy To Rice* (P-to-R) melalui *rice milling unit* (RMU);
- d) Pengembangan Subsistem Hulu (On-farm).

3. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi

- a) Optimalisasi pemberian bantuan dan pemanfaatan serta penerapan peralatan dan teknologi pertanian secara terintegrasi dan berkelanjutan
- b) Meningkatkan kemudahan akses permodalan dan pemberian bantuan permodalan secara terintegrasi dan tepat sasaran

c) Optimalisasi pemberian bantuan bibit dan pupuk bersubsidi seara tepat sasaran

4. Strategi Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

- a) Meningkatkan keterlibatan stakeholder terkait yang terdiri dari pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan perusahaan swasta, dan perbankan dalam pengembangan pertanian secara terpadu.
- b) Pembentukan dan peningkatan peran Gapoktan
- c) Memfasilitasi pendirian dan peningkatan peran koperasi
- d) Rekrutmen tenaga pendamping lapangan, dan fasilitator kemitraan antara kelompok petani beras dan koperasi.

5. Strategi Peningkatan Kemudahan Distribusi dan Pemasaran

- a) Peningkatan branding produk dengan memanfaatkan teknologi informasi
- b) Meningkatkan pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi
- c) Menjalin kerjasama dengan daerah potensial untuk pemasaran produk
- d) Meningkatkan penggunaan produk beras lokal, misalnya untuk kalangan ASN dan Pelaku Usaha di Kabupaten Katingan
- e) Meningkatkan kualitas packaging produk melalui pendampingan dan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan.

7.3 Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal

Masterplan ini merupakan pedoman dan referensi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang berupaya dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah. Masterplan dalam bagian ini akan dipaparkan per produk unggulan daerah agar lebih komprehensif dan mewadai upaya penumbuhan dan pengembangan produk unggulan daerah. Adapun masterplan pengembangan ekonomi lokal produk unggulan beras, olahan ikan, durian, dan rotan di Kabupaten Katingan selengkapnya di sampaikan pada Lampiran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data potensi dan permasalahan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan hasil kajian ini:

1) Berdasarkan hasil perhitungan location quotient (LQ) menurut lapangan usaha per sektor dan sub sektor di Kabupaten Katingan tahun 2019-2021, berikut ini merupakan sektor dan sub sektor basis di Kabupaten Katingan:

Sektor

- a) Sektor jasa lainnya dengan hasil perhitungan LQ sebesar 2,42;
- b) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,48;
- c) Sektor konstruksi dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,44;
- d) Sektor jasa pendidikan dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,34;
- e) Sektor real estate dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,33;
- f) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,31;
- g) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,28; dan
- h) Sektor transportasi dan pergudangan dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,11.

Sub Sektor

- a) Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dengan hasil perhitungan LQ sebesar 3,63;
- b) Sub sektor perikanan dengan hasil perhitungan LQ sebesar 2,66;
- c) Sub sektor pertambangan biji logam dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,57;
- d) Sub sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian dengan hasil perhitungan LQ sebesar 1,06
- 2) Berdasarkan hasil perhitungan *shift share* menurut lapangan usaha per sektor dan sub sektor di Kabupaten Katingan tahun 2020-2021. Berikut ini merupakan sektor dan sub sektor dengan nilai Dij positif, yang menandakan termasuk dalam sektor dan sub sektor kompetitif di Kabupaten Katingan:

Sektor

- a) Sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai *Dij* sebesar 20303,39;
- b) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai *Dij* sebesar 14019,76;
- c) Sektor informasi dan komunikasi dengan nilai Dij sebesar 9848,78;
- d) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan nilai *Dij* sebesar 8171,83;
- e) Sektor jasa pendidikan dengan nilai Dij sebesar 7204,71;
- f) Sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai Dij sebesar 6669,16;
- g) Sektor konstruksi dengan nilai Dij sebesar 1263,38;
- h) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai *Dij* sebesar 9848,78;
- i) Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan nilai *Dij* sebesar 200,11; dan
- j) Sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai Dij sebesar 127,10.

Sub Sektor

- a) Sub sektor perikanan dengan nilai Dij sebesar 16675,71;
- b) Sub sektor ketenagalistrikan dengan nilai Dij sebesar 87,10; dan
- c) Sub sektor pertambangan batu bara dan lignit dengan nilai *Dij* sebesar 7,50.
- 3) Berdasarkan hasil perhitungan tipologi Klassen menurut lapangan usaha per sektor dan sub sektor di Kabupaten Katingan. Berikut ini merupakan hasil tipologi Klassen sektor dan sub sektor di Kabupaten Katingan:

Kuadran Maju dan Tumbuh Cepat

Sektor

- a) Sektor konstruksi;
- b) Sektor transportasi dan pergudangan;
- c) Sektor jasa pendidikan;
- d) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; dan
- e) Sektor jasa lainnya.

Sub Sektor

a) Sub sektor perikanan

Kuadran Maju Tapi Tertekan

Sektor

- a) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;

- c) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
- d) Sektor real estate.

Sub Sektor

- a) Sub sektor pertanian, peternakan, perburuhan, dan jasa pertanian;
- b) Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu; dan
- c) Sub sektor biji logam.

Kuadran Potensial

Sektor

- a) Sektor jasa keuangan dan asuransi;
- b) Sektor informasi dan komunikasi;
- c) Sektor jasa perusahaan; dan
- d) Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang.

Sub Sektor

- a) Sub sektor pertambangan batu bara dan lignit, dan
- b) Sub sektor pengadaan gas dan produksi gas.

Kuadran Relatif Tertinggal

Sektor

- a) Sektor pertambangan dan penggalian;
- b) Sektor industri pengolahan;
- c) Sektor pengadaan listrik dan gas; dan
- d) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Sub Sektor

- a) Sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya; dan
- b) Sub sektor ketanagalistrikan.
- 4) Berdasarkan hasil pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:
 - a) Beras dengan nilai 67;
 - b) Rotan dengan nilai 64;
 - c) Produk Olahan Ikan dengan nilai 61; dan
 - d) Durian dengan nilai 61.
- 5) Permasalahan pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

Beras

- a) Ketersediaan lahan;
- b) Kesesuaian lahan;
- c) Manajemen usaha masih berskala kecil;

- d) Rendahnya kualitas sumber daya petani;
- e) Minimnya akses dan pemanfaatan teknologi;
- f) Belum optimalnya kelembagaan petani (Gapoktan);
- g) Pengemasan produk masih bersifat tradisional;
- h) Kurangnya branding produk; dan
- i) Terbatasnya jangkauan pemasaran.

Rotan

- a) Regulasi pelarangan ekspor rotan mentah;
- b) Berkurangnya pasokan rotan mentah;
- c) Berkurangnya lahan budi daya rotan;
- d) Rendanya harga rotan;
- e) Kapasitas produksi rotan tergantung permintaan;
- f) Berkurangnya permintaan pasar; dan
- g) Adanya rotan sintesis.

Produk Olahan Ikan

- a) Adanya bencana alam banjir;
- b) Tingginya kebutuhan modal untuk pengembangan usaha;
- c) Rendanya kualitas sumber daya manusia;
- d) Sarana dan prasarana pengolahan ikan masih tradisional;
- e) Terbatasnya jangkauan pemasaran;
- f) Kesulitan sertifikasi produk; dan
- g) Kurangnya branding produk.

Durian

- a) Belum adanya perawatan intensif dari petani;
- b) Manajemen usaha masih berskala kecil;
- c) Sistem pemasaran durian masih bersifat tradisional;
- d) Tingginya kebutuhan modal untuk pengembangan usaha;
- e) Terbatasnya akses permodalan;
- f) Rendanya kualitas sumber daya manusia;
- g) Belum adanya pelatihan pemanfaatan teknologi pasca panen; dan
- h) Minimnya diversifikasi produk turunan durian.
- 6) Forum pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan kerjasama A-B-G (*Academic, Bussines*, dan *Government*) di Kabupaten Katingan dalam rangka penguatan, peningkatan, dan pengembangan produk unggulan daerah, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Berikut ini merupakan peran dan pihak yang terlibat dalam PEL Kabupaten Katingan:

Pengarah, terdiri dari:

a) Bupati Kabupaten Katingan;

- b) Wakil Bupati Kabupaten Katingan;
- c) Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan; dan
- d) Asisten bagian ekonomi.

Ketua, diisi oleh:

a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan.

Sekretaris, diisi oleh:

a) Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

Anggota, terdiri dari:

- a) OPD Kabupaten Katingan;
- b) KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Bank Kalteng cabang Katingan;
- e) PT Jamkrida Kalimantan Tengah;
- f) Pergurungan Tinggi di Kabupaten Katingan; dan
- g) Pelalu Usaha di Kabupaten Katingan
- 7) Forum pengembangan ekonomi lokal (PEL) memiliki tugas untuk:
 - a) Penguatan UMKM produk unggulan daerah;
 - b) Pengembangan inkubator usaha;
 - c) Fasilititator sektor swasta dalam rangka membuat jaringan usaha dengan mitra lain;
 - d) Optimalisasi layanan pemerintah terhadap sektor swasta;
 - e) Penigkatan iklim kondusif bagi dunia usaha;
 - f) Penigkatan pola pelayanan perizinan satu pintu;
 - g) Peningkatan kinerja sektor pemerintah; dan
 - h) Peningakatan pemasaran potensi ekonomi daerah.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data potensi dan permasalahan pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini rekomendasi dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah dan peningkatan daya saing ekonomi:

- 1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui model inkubator dengan tipe *venture inkubator*.
- 2) Model pengembangan inkubasi terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

Pra Inkubasi

- a) Penjaringan calon tenant;
- b) Seleksi calon tenant;
- c) Penilaian calon produk tenant; dan
- d) Penentuan penerimaan tenant.

Inkubasi

- a) Pelayanan jasa teknis tenant;
- b) Diklat terhadap tenant; dan
- c) Research and development.

Pasca Inkubasi

- a) Royalti;
- b) Profit Share; dan
- c) Best Pratice.
- 3) Strategi pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

Beras

1. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pertanian secara Berkelanjutan

- a) Pengaturan pemanfaatan lahan pertanian dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan
- b) Optimalisasi ketaatan pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya

2. Strategi Peningkatan Produktifitas Produksi

- a) Peningkatan riset pengembangan varietas bibit unggul dan kesesuaian lahan pertanian
- b) Program pengaturan pola tanam produk petani antara beras putih, beras merah, dan dedak;
- c) Pengembangan pada subsistem hilir ini terkait dengan skema *Paddy To Rice* (P-to-R) melalui *rice milling unit* (RMU);
- d) Pengembangan Subsistem Hulu (On-farm).

3. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi

- a) Optimalisasi pemberian bantuan dan pemanfaatan serta penerapan peralatan dan teknologi pertanian secara terintegrasi dan berkelanjutan
- b) Meningkatkan kemudahan akses permodalan dan pemberian bantuan permodalan secara terintegrasi dan tepat sasaran
- c) Optimalisasi pemberian bantuan bibit dan pupuk bersubsidi seara tepat sasaran

4. Strategi Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

- a) Meningkatkan keterlibatan stakeholder terkait yang terdiri dari pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan perusahaan swasta, dan perbankan dalam pengembangan pertanian secara terpadu.
- b) Pembentukan dan peningkatan peran Gapoktan
- c) Memfasilitasi pendirian dan peningkatan peran koperasi
- d) Rekrutmen tenaga pendamping lapangan, dan fasilitator kemitraan antara kelompok petani beras dan koperasi.

5. Strategi Peningkatan Kemudahan Distribusi dan Pemasaran

- a) Peningkatan branding produk dengan memanfaatkan teknologi informasi
- b) Meningkatkan pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi
- c) Menjalin kerjasama dengan daerah potensial untuk pemasaran produk
- d) Meningkatkan penggunaan produk beras lokal, misalnya untuk kalangan ASN dan Pelaku Usaha di Kabupaten Katingan
- e) Meningkatkan kualitas packaging produk melalui pendampingan dan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan.

Rotan

- 1. Strategi peningkatan dan kontinyituas produksi rotan, diimplemetasikan melalui kegiatan:
 - a) Penyusunan peta potensi, profil dan database perkebunan rotan, diantaranya memuat profil petani, luas lahan, dan hasil panen dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - b) Pendampingan dan pelatihan kepada petani rotan (*up scaling*) dalam pengelolaan dan perawatan perkebunan rotan secara intenfif dan berkelanjutan;
 - c) Memberikan kemudahan akses permodalan dan bantuan permodalan kepada petani rotan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
 - d) Meningkatkan kemudahan aksesibilitas ke perkebunan rotan sehingga dapat menurunkan biaya produksi rotan;
 - e) Menerapkan teknik agroforestry;
 - f) Pengembangan perkebunan rotan secara berkenjutan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan melalui pencegahan *deforestasi*, degradasi, dan konversi lahan.
- 2. **Stategi perluasan jaringan pemasaran**, diimplementasikan melalui kegiatan:

- a) Melakukan kajian distribusi dan pasar potensial produk rotan
- b) Meningkatkan jejaring pemasaran agar meningkatkan *demand* produk rotan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta dapat meningkatkan harga pasar produk rotan.
- Menciptakan pasar rotan berdasarkan tiap ragam jenis dan kualitas rotan baik untuk permintaaan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
- d) Meningkatkan *branding* melalui narasi budaya dan kampanye cinta rotan. Bila kita tidak membeli rotan maka rotan akan punah;
- e) Mewajibkan dan atau mendorong penggunaan rotan di kantor pemerintah, pemda, BUMN/D, hotel, restoran, café, bandara, dll
- 3. **Strategi pengembangan nilai tambah produk**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pengusaha mebel/furniture sehingga menjadi perusahaan furniture kelas dunia;
 - b) Menyiapkan litbang (diferensiasi) produk kreatif baru sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas untuk jaringan pemasaran Rotan di Indonesia;

Produk Olahan Ikan

- 1. Strategi Optimalisasi Potensi dan Peningkatan Produksi Perikanan, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Identifikasi potensi dan lokasi potensial perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b) Pembuatan database nelayan, pelaku pengolahan ikan, dan produk olahan ikan secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi;
 - c) Memberikan kemudahan akses permodalan kepada nelayan dengan melibatkan pihak perbankan;
 - d) Mengoptimalkan pemberian bantuan permodalan bagi nelayan secara berkelanjutan dan tepat sasaran;
 - e) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang handal berbasis teknologi dan otomatisasi;
 - f) Pengembangan sistem penyimpanan dan pengawetan hasil tangkapan seperti cold storage;
 - g) Memberikan pendampingan dan pelatihan secara teintegrasi dan berkelanjutan kepada kelompok nelayan.
 - h) Mengembangkan tempat pelelangan hasil tangkapan dari nelayan
 - i) Memfasilitasi pendirian koperasi nelayan; dan

- j) Penanganan banjir di wilayah yang potensial budidaya dan pengolahan produk olahan perikanan melalui sosialisasi pencegahan kerusakan hutan, kerjasama antar-pihak, dan melakukan penindakan tegas kepada pihak perusak lingkungan.
- 2. **Stategi Peningkatan Pengolahan Produk Olahan Ikan**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Identifikasi kebutuhan sarana produksi pengolahan ikan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha;
 - b) Optimalisasi pemberian bantuan sarana produksi dan akses permodalan kepada pelaku usaha pengolahan ikan secara terintegrasi dan tepat sasaran;
 - c) Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pengolahan ikan melalui pelatihan terintegratif dari hulu ke hilir, pengurusan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk ekspor, *packaging*, standarisasi produk, dan diversifikasi produk olahan ikan.
 - d) Fasilitasi pengurusan dan perpanjangan sertifikasi produk olahan ikan, diantaranya sertifikat halal dan BPOM
 - e) Peningkatan peran dan keterlibatan stakeholders terkait dalam pengembangan produk olahan ikan, diantaranya perguruan tinggi, Lembaga perbankan, instansi tekait, NGO, dll
 - f) Mendorong usaha terkait perikanan, diantaranya tempat wisata dan restoran
- 3. **Strategi peningkatan pemasaran produk olahan ikan**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Mengembangkan jejaring pemasaran produk olahan ikan di luar daerah Kabupaten Katingan
 - b) Membangun jejaring bisnis antara nelayan dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD
 - c) Peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan pemasaran produk olahan ikan berbasis teknologi informasi
 - d) Peningkatan *branding* produk olahan ikan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi
 - e) Pendampingan dan pelatihan secara intensif kepada pelaku usaha olahan ikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, serta platform digital
 - f) Meningkatkan keterlibatan berbagai pihak untuk mempromosikan produk olahan ikan Kabupaten Katingan.

Durian

- 1. Strategi Peningkatan Kontinyuitas Produksi Durian, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Penyusunan peta potensi, profil dan database perkebunan durian, diantaranya memuat profil petani, luas lahan, jenis durian, dan jumlah pohon durian, serta hasil panen dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b) Pengembangan varietas bibit unggul berciri khas Katingan melalui kerjasama dengan pihak terkait;
 - c) Pendampingan dan pelatihan kepada petani durian (*up scaling*) dalam pengelolaan dan perawatan perkebunan durian secara intenfif dan berkelanjutan;
 - d) Optimalisasi pemberian bantuan bibit dan pupuk subsidi secara integratif dan tepat sasaran
 - e) Memberikan kemudahan akses permodalan dan bantuan permodalan kepada petani durian secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
 - f) Pengembangan perkebunan durian secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
- 2. **Stategi Peningkatan Nilai Tambah produk Durian**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Melakukan kajian pengembangan produk turunan durian, beserta kebutuhan sarana produksi yang dibutuhkan.
 - b) Optimalisasi pemberian bantuan sarana produksi dan akses permodalan kepada pelaku usaha pengolahan produk durian secara terintegrasi dan tepat sasaran.
 - c) Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pengolahan produk turunan durian melalui pelatihan terintegratif dari hulu ke hilir, pengurusan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk ekspor, packaging, standarisasi produk, dan diversifikasi produk olahan durian.
 - d) Fasilitasi pengurusan dan perpanjangan sertifikasi produk olahan durian, diantaranya sertifikat halal dan BPOM
 - e) Peningkatan peran dan keterlibatan stakeholders terkait dalam pengembangan produk olahan durian, diantaranya perguruan tinggi, Lembaga perbankan, instansi tekait, NGO, dll
 - f) Pengembangan kawasan perkebunan durian menjadi objek wisata edukasi dan minat khusus.

- 3. **Strategi peningkatan pemasaran produk Durian**, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a) Mengembangkan jejaring pemasaran produk durian di luar daerah Kabupaten Katingan
 - b) Peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan pemasaran produk durian berbasis teknologi informasi
 - c) Peningkatan *branding* produk durian dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi
 - d) Pendampingan dan pelatihan secara intensif kepada pelaku usaha durian melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, serta platform digital
 - e) Meningkatkan keterlibatan berbagai pihak untuk mempromosikan produk durian Kabupaten Katingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. (2002). Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya Di. Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Ary, D. J., & A., L. (1982). Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Penerjemah Furchan, A). Surabaya: Usaha Nasional.
- Blakely, E. J., & Bradshaw, T. K. (1994). Planning Local Economic Development: Theory and Practice. Thousand Oaks: SAGE.
- Bradshaw, T. K., & Blakely, E. J. (1999). What are "Third-Wave" State Economic Development Efforts? From Incentives to Industrial Policy . Economic Development Quarterly.
- Camagni, R. (2002). On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies.
- Christensen, C. M. (1997). The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston: Harvard Business School Press.
- Hamdan, H. (2018). Industri 4.0: Pengaruh revolusi industri pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi. Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). Metodologi Penelitian dan. Bisnis. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Meyer-Stamer, J. (2003). Why is Local Economic Development so difficult, and what can we do to make it more effective?
- Mulyana, N., Fauziyyah, H., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Ekonomi Lokal Jatinangor melalui Wisata Edukasi. Share Social Work Journal, 115-129.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial. (2018). Journal of Proceedings Series.
- Rangkuti, F. (2016). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, Edisi Duapuluh Dua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutopo, H. (2002). Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Master Plan PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kabupaten Katingan

Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Revolusi Industri 4.0

- Tambunan, T. T. (1996). Perekonomian Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2003). Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan. Sektor Basis Komoditas Unggulan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Webster, D., & Muller, L. (2000). Assessment In Developing ♦ Country Urban Regions : ♦ The Road Forward.